



**PERAN POLITISI PEREMPUAN DALAM
KONTESTASI POLITIK DI KABUPATEN SIKKA
(Studi Fenomenologi Terhadap Partisipasi Calon
Legislatif Perempuan)**

**TESIS
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER**

**OLEH :
ASELDI LIO
NIM : 176150200111005**

**PROGRAM MAGISTER KAJIAN GENDER
PASCASARJANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019**



IDENTITAS TIM PENGUJI TESIS

Judul Tesis : PERAN POLITISI PEREMPUAN DALAM KONTESTASI
POLITIK DI KABUPATEN SIKKA
(Studi Fenomenologi Terhadap Calon Legislatif
Perempuan)

Nama : Aseldi Lio
NIM : 176150200111005

Program Studi : Program Magister Kajian Gender

Komisi Pembimbing

Ketua : Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., M.PAff., Ph.D

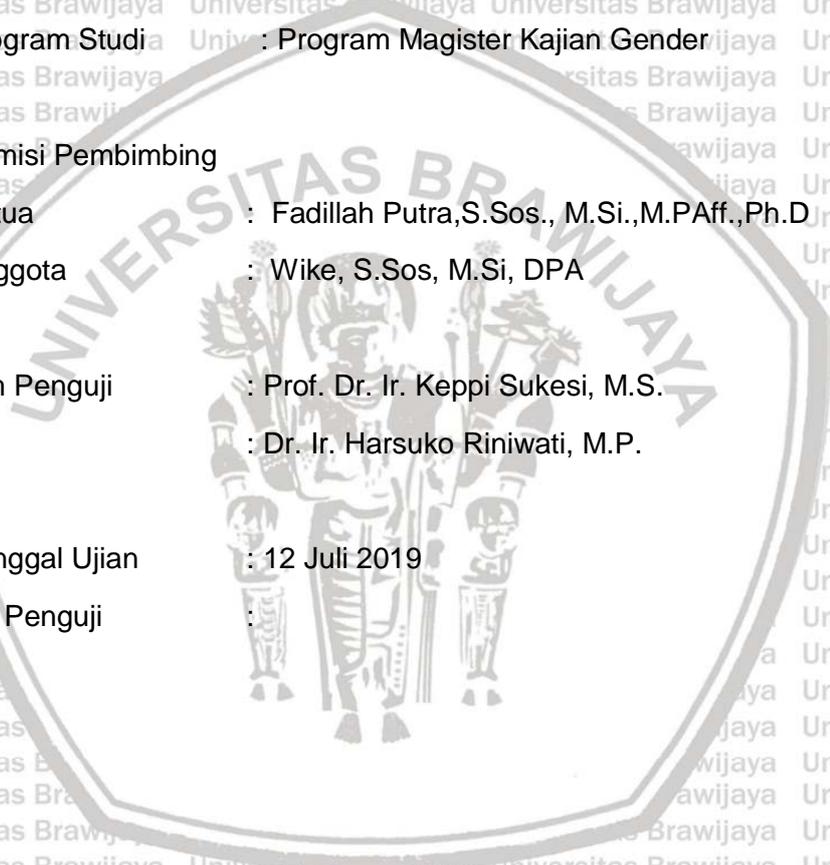
Anggota : Wike, S.Sos, M.Si, DPA

Tim Penguji : Prof. Dr. Ir. Keppi Sukesu, M.S.

: Dr. Ir. Harsuko Riniwati, M.P.

Tanggal Ujian : 12 Juli 2019

SK Penguji :





PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiaris, saya bersedia tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 12 Juli 2019

Yang menyatakan,

Aseldi Lio

NIM. 176150200111005





MOTTO

*“Nama Baik Lebih Berharga Daripada Kekayaan,
Dikasih Orang Lebih Baik Daripada Perak
dan Emas “ (Kitab Amsal, 22 : 1)*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk yang tercinta, Kekasih Hati-ku dan ketiga buah hati kami. Kalian adalah Sumber Semangat dan Inspirasi bagi Mama... Terima kasih sudah dengan sabar menanti selesainya proses studi ini. Semoga jadi Berkat.

*Papa Yerri D. Silewe
Trio P.J. Silewe (Tessa-Samuel-Thalia)*



RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

1.	Nama Lengkap	: Aseldi Lio
2.	Tempat/ Tanggal Lahir	: Sikka-NTT/ 06 Oktober 1973
3.	Jenis Kelamin	: Perempuan
4.	Agama	: Katolik
5.	Instansi Asal	: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka - Provinsi Nusa Tenggara Timur
6.	Alamat Instansi	: Jln. Adisucipto No.1, Kelurahan Waiti-Kecamatan Alok Timur- Kota Maumere- Kabupaten Sikka - 86111
7.	No.Telp/ e-mail Instansi	: (0382) 23745 / ---
8.	Alamat Rumah	: Pondok Batarang, Jl. K.S. Tubun- No. 21, Kelurahan Kota Baru - Kec. Alok Timur- Kota Maumere - Kab. Sikka - Flores - NTT
9.	No. Telp/HP Rumah	: 0822 3618 9403 / 0812 3738 1449
10.	Email	: seldy_dewa@yahoo.com

PENDIDIKAN

NO	TINGKAT	PENDIDIKAN	JURUSAN	TAHUN	TEMPAT
1	SD	SDK 059 Ohe	-	1979-1985	Maumere-Kab. Sikka- NTT
2.	SMP	SMPK Renha Rosario Kewapante	-	1985-1988	Maumere-Kab. Sikka- NTT
3.	SMA	SMAK St. Petrus Kewapante	IPA	1988-1991	Maumere-Kab. Sikka- NTT
4.	DIII	Unika Widya Karya	MITEK	1992-1996	Malang - Jatim
4.	S1	Universitas Thribuwana Tungga Dewi	Ekonomi Manajeme n	2004-2006	Malang - Jatim
5.	S2	Universitas Brawijaya	Kajian Gender	2017-2019	Malang - Jatim

PENGALAMAN PEKERJAAN

NO.	RINCIAN	TAHUN
1.	Staf Divisi Training pada PT. Pelangi Indah Canindo - Jakarta	1996 -1997
2.	Staf HRD pada Astra Motor - Jakarta	1997 – 1998

3.	Staf pada BAPPEDA Kabupaten Sikka-NTT	1999 - 2005
4.	Staf pada Kecamatan Alok, PJOK PNPM	2005 - 2009
5.	Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan	2009 - 2012
6.	Kasubag Program, Keuangan dan Evaluasi	2012 - 2014
7.	Kasie Ketentraman dan Ketertiban	2014 - 2016
8.	Kasie Pengarusutamaan Gender	2016 - 2017

PENGALAMAN SEMINAR/LOKAKARYA/PELATIHAN

NO.	RINCIAN	TAHUN
1.	Pelatihan Sistem Perlindungan Anak	2017
2.	Lokakarya Penyusunan Profil Anak	2017
3.	Seminar Nasional Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	2017
4.	Seminar Potensi Kriminal Perempuan dan Anak pada Tindak Pidana Kesusilaan dan RUU KUHP	2018
5.	Lokakarya Parenting Zaman Now, Zaman Digital	2018
6.	Pelatihan <i>Capacity Building</i> Penanganan Kasus	2018
7.	Pelatihan Konvensi Hak Anak Untuk Stakeholder Kesehatan bersama LPA Jawa timur	2018
8.	Seminar Tinjauan Kritis Gerakan Perempuan Terhadap Gender dan Respon Posisi Politik Perempuan Masa Kini	2018
9.	Seminar Perspektif Gender Terhadap Kesehatan Reproduksi Menuju Keluarga Yang Ideal dan Sakinah	2018
10.	Pelatihan Metode <i>Coaching</i>	2018
11.	ICGD (<i>International Conference On Gender and Development</i>)	2018

KETERANGAN KELUARGA

1. Orang tua

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN
1.	Yohanes Yosef Utapara (Alm)	Legar, Sikka-NTT	22 Desember 1922	Wiraswasta
2.	Hendrika Ludju Keytimu	Legar, Sikka-NTT	31 Desember 1933	Ibu RT
3.	Paulus Silewe	Ililewa, Sikka-NTT	18 April 1940	Pensiunan Guru dan Politisi
4.	Maria Theresia Nona	Rekas, Ruteng-NTT	21 Januari 1945	Pensiunan Guru

2. Suami

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN
1.	Yeremias Dewa, S.Pt.,MP	Maumere, Sikka - NTT	04 September 1973	ASN

3. Anak

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN
1.	Paula Theresa P.J. Silewe	Lela-Maumere, Sikka-NTT	11 September 2002	Pelajar SMA
2.	Luis Samuel Ch. P.J. Silewe	Maumere, Sikka-NTT	08 April 2007	Pelajar SMP
3.	Odilia M. Athalia P.J. Silewe	Maumere, Sikka-NTT	21 Pebruari 2014	TKK



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, karena berkat kasih dan karuniaNya maka penulisan tesis dengan judul “ Peran Politisi Perempuan Dalam Kontestasi Politik di Kabupaten Sikka (Studi Fenomenologi Terhadap Partisipasi Calon Legislatif Perempuan)” ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penelitian dan penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Master, pada Program Magister Kajian Gender Universitas Brawijaya dan merupakan kesempatan berharga untuk menerapkan beberapa teori yang diperoleh selama menempuh pendidikan dalam situasi dunia nyata. Tanpa kesempatan, bimbingan, masukan serta dukungan semangat dari berbagai pihak, tentunya tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana bentuknya saat ini.

Penulis menyadari bahwa selesainya penelitian dan penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak baik secara moril maupun materil, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS., selaku Rektor Universitas Brawijaya;
2. Prof. Dr. Marjono, M.Phil, selaku Direktur Pascasarjana Multidisipliner Universitas Brawijaya;
3. Wike, S.Sos., M.Si.,DPA selaku Ketua Program Studi Magister Kajian Gender Pascasarjana Universitas Brawijaya;
4. Bupati Sikka - Propinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan kesempatan dengan menugaskan penulis untuk melanjutkan studi;
5. Fadillah Putra, S.Sos.,M.Si.,M.PAff.,Ph.D selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini;
6. Wike, S.Sos.,M.Si.,DPA selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini;
7. Para dosen pada Program Magister Kajian Gender Universitas Brawijaya;
8. Para pegawai dan staf administrasi pada Program Magister Kajian Gender Universitas Brawijaya;
9. Para politisi perempuan sebagai partisipan dan para nara sumber dalam penelitian ini serta semua sahabat perempuan *Gender Focal Point* di Kabupaten Sikka;
10. Ayahanda (alm) dan Ibunda bersama Mertuaku, terima kasih tiang doaku, semoga Allah berkenan mencurahkan kasihNya sebagaimana curahan kasih sayang yang telah diberikan kepada ananda;
11. Saudara-saudaraku terkasih, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan.

12. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Kajian Gender, khususnya De Farida, De Ryzki dan De Audy yang sudah banyak meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama, terima kasih atas dukungan dan persahabatan selama kita menjalani proses studi;

Kepada pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, penulis sampaikan penghargaan dan rasa terimakasih yang tidak terhingga; karena dengan bantuan Bapak dan Ibu semuanya maka tesis ini dapat diselesaikan penulisannya dengan baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian bagi kejayaan Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai. Amin.

Malang, 12 Juli 2019
Penulis,

Aseldi Lio
NIM. 176150200111005



RINGKASAN

Aseldi Lio. NIM : 176150200111005. Program Magister Kajian Gender, Judul: PERAN POLITISI PEREMPUAN DALAM KONTESTASI POLITIK DI SIKKA (Studi Fenomenologi Terhadap Partisipasi Calon Legislatif Perempuan). Pembimbing 1: Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., M.PAff., Ph.Dan Pembimbing 2 : Wike, S.Sos., M.Si., DPA

Sistem perwakilan sebagai bentuk moderen demokrasi mengisyaratkan terbukanya akses dan peluang yang sama bagi warga negara dalam aktivitas politik. Realitas politik menunjukkan bahwa pada kebanyakan sistem politik, perempuan menempati proporsi kecil dalam jabatan-jabatan politik. Secara umum perempuan relatif sedikit memiliki posisi kekuasaan dan pengaruh dalam kehidupan publik dibandingkan pria. Hal ini dikarenakan anggapan perempuan sendiri bahwa politik itu kotor. Budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat seakan melanggengkan hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Memahami dan menganalisis pemaknaan caleg perempuan terhadap peran politisi perempuan, 2) Untuk menjelaskan makna pengalaman dan motivasi calon legislatif perempuan dalam kontestasi politik, 3). mendeskripsikan makna keberadaan caleg perempuan sebagai politisi perempuan dalam kontestasi politik

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan perspektif feminis liberal bersama dengan 7 orang partisipan politisi perempuan dari beberapa partai politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Politisi perempuan masing-masing mempunyai pemaknaan yang berbeda dalam pemahaman, motivasi dan juga pengalaman mereka dalam kontestasi politik. Ada politisi perempuan yang memaknai perannya sebagai seorang pejuang agenda gender dan penyalur aspirasi masyarakat tapi ada pula sebagiannya memaknai berbeda yakni untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ada beberapa hal yang membatasi fenomena mental para politisi perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender di ranah politik yakni antara lain, pertama, tidak semua calon legislatif sebagai politisi perempuan memahami agenda tentang gender, kedua ketika politisi perempuan sudah memahami agenda tentang gender, namun belum tentu terpilih menjadi anggota legislatif karena agenda gendernya dan yang ketiga, setelah memahami agenda tentang gender dan terpilih menjadi anggota legislatif, para politisi perempuan tidak maksimal mengelola isu gender karena masih ada kendala-kendala kultural yang berkaitan dengan patriarki dan peran domestiknya.

Oleh karena itu memperjuangkan agenda tentang isu-isu gender lebih berat dibandingkan dengan memperjuangkan isu-isu yang lainnya. Akibatnya ketika membicarakan tentang alokasi anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tupoksi pada bidang pemberdayaan perempuan dan anak, alokasi anggarannya sangat sedikit, karena yang memperjuangkannya juga sedikit.

Kata Kunci : Fenomenologi, Feminisme, Makna, Peran, Politisi Perempuan

SUMMARY

Aseldi Lio. NIM: 176150200111005. Magister Course on Gender Studies, Brawijaya University, 2019. Title: ROLE OF WOMEN POLITITION IN POLITICAL CONTESTATION IN SIKKA (Phenomenological Study of Participation in Women Legislative Candidates). Supervisor 1: Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., M.PAff., Ph.D and Supervisor 2: Wike, S.Sos., M.Si., DPA

The system of representation as a modern form of democracy implies the opening of equal access and opportunities for citizens in political activities. Political reality shows that in most political systems, women occupy a small proportion in political positions. In general, women have relatively few positions of power and influence in public life compared to men. This is due to the opinion of women themselves that politics is dirty. A patriarchal culture that develops in society that places women in a subordinate position as if perpetuating this. This study aims to 1) Understand and analyze the meaning of female candidates on the role of female politicians, 2) To explain the meaning of experience and motivation of female legislative candidates in political contestation, 3). describe the meaning of the existence of female candidates as female politicians in political contestation

The method used in this study is a qualitative method using a phenomenology approach with a liberal feminist perspective along with 7 female politician participants from several political parties.

The results showed that female politicians each had different meanings in understanding, motivation and their experiences in political contestation. There are female politicians who interpret their role as a gender agenda fighter and channel the aspirations of the people, but there are also different meanings to fight for the interests of the community. There are some things that limit the mental phenomena of female politicians in fighting for gender equality in the political sphere, among others, first, not all legislative candidates as female politicians understand the agenda on gender, second when female politicians have understood the agenda about gender, but not necessarily elected legislative members because of their gender agenda and third, after understanding the agenda on gender and being elected as a member of the legislature, female politicians do not optimally manage gender issues because there are still cultural constraints related to patriarchy and its domestic role.

Therefore fighting for an agenda on gender issues is more severe than fighting for other issues. As a result, when talking about budget allocations for regional apparatus organizations that have duties and functions in the field of empowering women and children, the budget allocation is very small, because those who fight for them are also small.

Keywords : Phenomenology, Feminism, Meaning, Role, Female Politicians

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, karena berkat kasih dan KaruniaNya maka hasil tesis dengan judul “Peran Politisi Perempuan dalam Kontestasi Politik di Kabupaten Sikka (Studi Fenomenologi Terhadap Partisipasi Calon Legislatif Perempuan)” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Kajian Gender pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Realitas politik menunjukkan bahwa perempuan menempati proporsi kecil dalam jabatan politik. Sementara disatu sisi kehadiran perempuan dalam parlemen merupakan indikator vital bagi negara yang memberlakukan prinsip demokrasi dalam pemerintahannya. Gambaran peran perempuan dibidang publik yang terkait dengan politik secara statistik masih belum menggembirakan. Perempuan sendiri masih menganggap bahwa politik itu adalah suatu permainan yang kotor. Melalui tesis ini diharapkan mampu menganalisis pemaknaan peran politisi perempuan dalam partisipasinya sebagai calon legislatif perempuan melalui pemahaman dan pengalamannya, sehingga keadilan gender dapat terwujud.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Semoga dapat bermanfaat bagi perjuangan kesetaraan gender khususnya bidang politik di Kabupaten Sikka dan secara umum untuk perkembangan kajian perempuan di Indonesia.

Malang, 12 Juli 2019

Penulis



DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IDENTITAS TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP PENULIS	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
SUMMARY	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Penelitian Terdahulu	18
2.2 Perempuan dan Politik	24
2.3 Perempuan dan Politik Dalam Perspektif Feminis	33



2.4	Kajian Fenomenologi.....	40
III.	METODE PENELITIAN	51
3.1	Jenis dan Desain Penelitian.....	51
3.2	Lokasi dan waktu Penelitian.....	52
3.3	Fokus Penelitian	52
3.4	Subyek Penelitian	53
3.5	Instrumen Penelitian	54
3.6	Teknik Pengumpulan Data	54
3.7	Analisis Data	56
3.8	Uji Keabsahan Data	57
3.9	Etika Penelitian	59
IV.	ANALISIS SETTING SOSIAL	61
4.1	Geografis Kabupaten Sikka	61
4.2	Gambaran Umum Politik di Kabupaten Sikka	63
4.3	Sejarah Politisi Perempuan Pada Lembaga Legislatif di Kabupaten Sikka.....	64
V.	HASIL PENELITIAN	69
5.1	Pendahuluan	69
5.2	Hasil Penelitian	69
5.3	Pembahasan	89
VI.	PENUTUP	97
6.1	Kesimpulan	97
6.2	Saran	98
	DAFTAR PUSTAKA.....	99
	LAMPIRAN.....	102



DAFTAR TABEL

3.1. Daftar Partisipan Penelitian.....	53
4.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin	62
4.2. Jumlah Pemilih Tetap Per Dapil Tahun 2019 dan 2019	64
4.3. Tabel Anggota Legislatif dari Tahun 1959-2019	65
4.4. Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Tahun 2014	66
4.5. Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Tahun 2019	67
4.6. Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Tahun 2014	68





DAFTAR GAMBAR

2.1. Gambar Kerangka Konseptual 50



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perwakilan sebagai bentuk modern demokrasi mengisyaratkan terbukanya akses dan peluang yang sama bagi warga negara dalam aktivitas politik. Realitas politik menunjukkan bahwa pada kebanyakan sistem politik, perempuan menempati proporsi kecil dalam jabatan-jabatan politik dan secara umum perempuan relatif sedikit memiliki posisi kekuasaan dan pengaruh dalam kehidupan publik dibandingkan pria (Piktin, 2004)

Budaya patriarki dalam masyarakat yang bertumbuh dengan subur, telah menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada di bawah laki-laki (subordinat), yang menyebabkan rawan akan kecenderungan terjadinya berbagai stereotip (pelabelan negatif), marginalisasi (peminggiran dan pemiskinan perempuan), subordinasi (yang berdampak pada eksploitasi) serta tindakan-tindakan kekerasan (*violence*). Hal ini selanjutnya menurut (Sadli, 2010) dapat berdampak pada pengambilan keputusan- keputusan penting yang menyangkut orang banyak seringkali dianggap terlalu riskan untuk diserahkan kepada perempuan.

Perempuan sendiri menurut Venny dalam (Wijaksana, 2004), menganggap bahwa politik itu sebagai suatu permainan kotor. Anggapan ini telah memukul rasa percaya diri perempuan untuk berhadapan dengan proses politik.

Ketidakpercayaan diri kerap menjadi penyebab utama tidak tampilnya perempuan dalam pentas politik formal seperti dalam partai politik, parlemen atau pemerintahan. Ketidakberuntungan perempuan ini secara sosial ekonomi telah

menempatkan perempuan menjadi kelompok warga negara yang rentan akan kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan dan sebagai akibatnya kesempatan perempuan untuk memperjuangkan haknya menjadi sangat kecil.

Di Indonesia, gambaran peran perempuan di bidang publik yang terkait dengan politik secara statistik masih belum menggembirakan. Hal itu dapat dicermati dengan melihat hasil pemilu dari tahun ke tahun yang masih didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini dapat dibuktikan dalam pemerintahan yakni dengan banyaknya pejabat publik laki-laki, baik di wilayah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam politik kaum perempuan sering dipandang tidak berhak menjadi pemimpin sehingga membuat perempuan tidak tertarik dengan politik dan tidak sadar akan diskriminasi hak serta perannya (Umar, 2010)

Menurut Bordieau (2010), pada dasarnya ketidakadilan yang sering dipermasalahkan perempuan adalah tentang krisis kehadiran perempuan dalam ranah publik dikarenakan minimnya aksesibilitas mereka untuk terlibat. Perempuan tidak bisa mengekspresikan keberadaan dan aspirasi mereka untuk dapat didengar dan dilaksanakan demi kesetaraan gender. Namun nyatanya ranah publik sebagai akses vital dan strategis bagi arus aspirasi di masyarakat memiliki corak yang sangat patriarkis dan maskulin. Ruang publik adalah satu-satunya ruang yang dapat menciptakan suatu aturan yang adil dan setara terhadap perempuan di dalam bermasyarakat. Namun karena struktur sosial yang terbentuk justru mengakibatkan perempuan dipinggirkan dari sarana untuk menyuarakan kepentingannya untuk dapat berperan setara dalam masyarakat.

Selanjutnya Bourdieau juga menjelaskan bahwa parlemen atau lembaga legislatif adalah ruang publik yang sangat strategis bagi suatu negara, karena disinilah dibuat dan ditentukan segala kebijakan menyangkut masyarakat.

Kehadiran perempuan dalam parlemen merupakan indikator vital bagi negara yang memberlakukan prinsip demokrasi dalam pemerintahannya. Perlunya peran perempuan dalam politik dan keterlibatannya dalam parlemen pada akhirnya dapat menentukan bahwa perempuan dapat diperlakukan secara adil dan setara. Anggapan secara umum, dunia politik merupakan dunia yang penuh dengan intrik. Panggung yang sarat dengan adu kekuatan, sarana orang-orang untuk unjuk kekuasaan, tempat orang yang bergelut untuk meraih, mempertahankan dan memperluas pengaruh. Politik adalah perebutan makna "kebenaran umum". Hal yang dianggap sebagai kebenaran umum itu akhirnya diputuskan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan politik (Wijaksana, 2004), Apa yang dianggap para pengambil keputusan sebagai kebenaran akhirnya harus diakui sebagai kebenaran bersama. Padahal keputusan politik ditentukan oleh segelintir orang yang umumnya adalah laki-laki, berasal dari kelas tertentu dan berpendidikan.

Hal ini menjadikan tantangan bagi perjuangan politisi perempuan yang semakin berat dibandingkan perjuangan politisi laki-laki, tetapi semua itu harus dilakukan oleh kaum perempuan dan oleh karenanya mematok kuota 30 % perempuan di parlemen menjadi sangat penting dalam rangka tindakan *affirmative action* (tindakan khusus sementara) sekaligus memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik.

Basis pemikiran lainnya adalah adanya keyakinan bahwa sangatlah penting bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasi politiknya baik secara kuantitatif dan kualitatif (Venny dalam Wijaksana, 2004), sebab dengan maju ke ruang publik dan menduduki tempat-tempat strategis pengambilan keputusan sebagai satu-satunya cara agar kepentingan mereka terwakili. Kepentingan

tersebut harus diperjuangkan oleh kaum perempuan sendiri sebab tidak mungkin dapat dirumuskan secara baik oleh kaum laki-laki

Hal ini mendorong perempuan untuk bergerak secara bersama-sama melawannya. Gerakan perempuan ini akhirnya mendapatkan respon dari organisasi Internasional *United Nations* (Perserikatan Bangsa/Bangsa PBB) dengan ditetapkannya *The Universal Declaration Of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia) pada tahun 1948 yang memberikan aspirasi bagi gerakan feminis untuk memperjuangkan hak-hak perempuan (*all human being are born free and equal in dignity and rights*), termasuk didalamnya hak politik dan ekonomi. Deklarasi ini kemudian memunculkan konsep emansipasi antara laki-laki dan perempuan di seluruh dunia. Gerakan Global emansipasi ini akhirnya masuk dalam agenda PBB (ECOSOC) 1963 dan diakomodir oleh negara-negara anggota termasuk Indonesia.

Pada tahun 2000, dari 189 negara yang tergabung dalam PBB menyepakati Deklarasi Milenium (*Millennium Declaration*) untuk melaksanakan tujuan pembangunan milenium (*Millennium Development Goals*) atau MDGs dengan menetapkan target keberhasilannya pada tahun 2015. Setelah berakhirnya program (*Millennium Development Goals*) atau MDGs pada September 2015, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali meluncurkan program pembangunan yang berkelanjutan dengan nama "*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memiliki 17 goals dengan 169 tujuan yang berlaku bagi Negara-negara maju dan berkembang termasuk Indonesia. Salah satu goals dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah mencapai kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan. Salah satu programnya adalah kesetaraan gender 50:50 pada tahun 2030. Menurut *United*

Nations kesetaraan gender adalah persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan hak-hak asasi mereka dan berkontribusi dalam pembangunan baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya serta politik.

Dalam penelitiannya, Manzini (2002) menemukan bahwa dalam bidang politik, keterwakilan perempuan yang tidak mencerminkan kesetaraan gender selama berpuluh-puluh tahun menginspirasi untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik. Pengalaman di negara lain telah membuktikan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik pembuat keputusan memiliki andil sangat penting dalam mewujudkan kebijakan yang peduli pada kepentingan perempuan. Di Afrika Selatan keterwakilan perempuan di parlemen telah memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kinerja berbagai departemen pemerintah, khususnya untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan perempuan, seperti proyek pengairan, kehakiman, pemerintahan lokal, perdagangan dan perindustrian.

Pemerintah membentuk seksi urusan gender di masing-masing departemen yang bekerja sama dengan Kantor Status Perempuan. Departemen-departemen pemerintah juga diwajibkan memprioritaskan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan. Berkat perjuangan perempuan di Parlemen Afrika Selatan, pemerintah telah melakukan program-program pembangunan untuk rakyat miskin dan perempuan, antara lain pembangunan klinik-klinik kesehatan di pedesaan, perbaikan sekolah, penyediaan makanan bagi anak-anak sekolah, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan subsidi perumahan

Indonesia sebagai salah satu negara anggota *United Nations* (PBB) turut meratifikasi kebijakan terkait isu-isu perempuan. Secara politik, pemerintah Indonesia mendudukan perempuan sebagai mitra sejajar pria tercermin dalam berbagai dokumen kebijakan, berupa undang-Undang, Keputusan- keputusan, resolusi dan usulan-usulan melalui konvensi-konvensi dan pertemuan internasional. Secara konstitusional laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 pasal 28 yang menegaskan bahwa hak warga negara

dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Undang-undang tersebut merupakan cerminan dari negara demokrasi yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk berkiprah, termasuk perempuan (Fauziyah,2015)

Sejarah mencatat, sejak awal sebelum berdirinya negara Indonesia, nama-nama perempuan yang tidak asing yang dinobatkan sebagai pahlawan perempuan atas dedikasinya yang sangat luar biasa. Misalnya Raden Ajeng kartini yang pemikirannya tertuang dalam sebuah karya yang diberi judul "Habis Gelap Terbitlah Terang" yang didalamnya memuat surat-surat yang ditulis kepada sahabatnya di negri Belanda, hal ini merupakan bukti betapa besarnya mimpi dari seorang kartini untuk melepaskan kaumnya dari segala bentuk diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya. Selanjutnya Cut Nyak Dien nama perempuan dari Aceh merupakan salah satu dari perempuan berhati baja yang diusianya yang lanjut masih mencabut "rencong" dan berusaha melawan pasukan Belanda sebelum akhirnya ditangkap.

Keterlibatan dan partisipasi perempuan di Indonesia dalam dunia politik diawali dari Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta pada 22

Desember 1928 menjadi awal kemudian ditandai dengan masuknya perempuan dalam keanggotaan parlemen pada pemilu tahun 1955. Keanggotaan perempuan pada saat itu dinilai sudah cukup berarti dan tidak hanya sebagai pelengkap. Namun di balik berbagai keberhasilan itu ternyata kondisi peran perempuan dalam dunia politik menjadi sangat buruk apabila dibandingkan dengan peran kaum laki-laki.

Pada Pemilu tahun 2014, komposisi jumlah pemilih perempuan dan laki-laki hampir seimbang yakni 50,04% laki-laki dan 49,96% perempuan. Dengan jumlah pemilih yang hampir seimbang tersebut dari 560 jumlah DPR RI perempuan yang duduk di Parlemen hanya mencapai 17,32 persen atau 97 anggota. Tinggi rendahnya partisipasi politik perempuan secara kuantitatif di Indonesia dapat kita lihat dari minimnya jumlah keterwakilan perempuan yang duduk dalam berbagai lembaga politik misalnya dalam lembaga legislatif dan partai politik.

Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 55 dan Pasal 56 ayat 2 jelas tertulis bahwa peserta pemilu harus melibatkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dan dalam daftar bakal calon harus terdapat sekurang-kurangnya 1 calon perempuan. Hal ini juga terdapat dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 ayat 2 dan ayat 5, 29 ayat 1a yang mewajibkan partai politik melibatkan perempuan sebanyak 30 persen. Ini sudah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan baik di tingkat nasional maupun lokal, namun keterwakilan perempuan pada Pemilu DPR 2014

mengalami penurunan sebesar 2 persen dari sebelumnya 19 persen pada Pemilu 2009 menjadi 17% pada Pemilu 2014 (*Puskapol UI hasil Pemilu 2014*).

Dari data yang ada, keterwakilan perempuan di parlemen khususnya DPR RI mengalami peningkatan juga penurunan. Pada masa orde baru keterwakilan perempuan mencapai 13% pada pemilu 1987 dan 12,5% pada pemilu 1992. Keterwakilan perempuan mengalami peningkatan pasca reformasi pada Pemilu tahun 2004 sampai dengan 2014. Keterwakilan perempuan DPR RI yang paling tinggi mencapai 18,1% yakni pada Pemilu 2009 meskipun tidak terjadi secara merata di semua daerah pemilihan (dapil) termasuk di tingkat kabupaten/kota. Pada Pemilu 2014, keterwakilan perempuan menurun menjadi 17,3% atau hanya sebanyak 97 orang perempuan dari total kursi di DPR RI sebanyak 560. Untuk jumlah anggota legislatif DPRD Provinsi pada Pemilu 2014 sebanyak 2112 orang, dengan presentase perolehan kursi sejumlah 336 (16%) perempuan dan laki-laki sebanyak 1776 orang atau (84%). sedangkan untuk jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 16.895 kursi, dengan presentase (14%) atau 2.365 perempuan dan 14.530 (86%) perolehan kursi untuk laki-laki. (*Puskapol UI hasil Pemilu 2014*).

Dengan data yang ada di temukan bahwa ada *tren inkonsistensi* yakni pada Dapil yang tingkat terpilihnya perempuan sebagai anggota DPR RI tinggi, belum tentu hal serupa terjadi pada terpilihnya perempuan sebagai anggota DPRD baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota. Bahkan terdapat sejumlah Dapil yang tidak ditemukan sama sekali perempuan yang terpilih untuk menduduki kursi legislatif. Fakta ini menunjukkan keterlibatan wanita yang semakin rendah ditingkat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen menandakan bahwa politik

masih berwajah maskulin, hanya menjadi milik laki-laki. Parawansa dalam Hiplunudin (2017) menuliskan bahwa fakta ini mencerminkan keadaan perempuan Indonesia di ranah politik yang masih saja terpinggirkan perannya. Dari fakta ini bisa disimpulkan bahwa perempuan Indonesia dianggap tidak begitu penting dan strategis untuk memasuki ranah politik.

Berbagai media massa turut mengulas tulisan serta pendapat tentang partisipasi caleg perempuan dalam kontestasi politik baik ditingkat nasional maupun di daerah. Hal ini membuktikan bahwa peran politik perempuan dianggap masih sangat penting untuk kehidupan berdemokrasi di negara Indonesia. Menurut Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Syamsuddin Alimsyah menegaskan, proteksi diperlukan untuk memastikan caleg perempuan terhindar dari persaingan bebas, tekanan psikologis, hingga permainan transaksi politik dalam proses pencalonan. *"Yang menjadi tantangan agar memastikan kerja penyelenggara melakukan pengawasan pada proses rekrutmen (caleg), dan memastikan betul-betul tidak ada permainan transaksi atau deal-deal lain yang mengebiri keterwakilan perempuan yang kita perjuangkan"*. Selanjutnya ia mengingatkan, caleg perempuan harus memiliki potensi tersendiri ketika masuk ke dalam ruang politik *"Sesungguhnya komunikasi politik perempuan itu lebih dekat kepada masyarakat dari pada laki-laki. Mereka bisa masuk ke rumah langsung dan lebih intens masuk langsung ke dalam masyarakat," "Kalau mau mendapatkan kebijakan yang berkualitas di parlemen, kebijakan yang responsif gender maka keterwakilan perempuan dalam ruang politik harus dipenuhi, bukan hanya sekadar aksesoris"* (Kompas,28/01/2018)

Selanjutnya menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh menegaskan bahwa semangat dari sistem yang mewajibkan partai politik untuk

memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif adalah upaya untuk meningkatkan peran perempuan. "*Semangat seluruh partai sama yaitu affirmative action. Bagaimana pemenuhan 30 persen keterlibatan perempuan itu adalah tugas partai untuk mencari perempuan agar terlibat di kancah perpolitikan,*" (Tempo, 22/5/2018)

Dari penelitian terdahulu ditemukan berbagai hal menarik tentang Peran politisi perempuan dalam kontestasi politik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Haryati (2017), dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan cukup baik, meski ada hambatan-hambatan tertentu. Hambatan terbesar berasal dari dalam diri kader perempuan yang tidak antusias menjalani persaingan dengan kader laki-laki karena mereka menganggap persaingan yang ketat menyita banyak waktu dan dengan demikian mereka kesulitan membagi waktu untuk tugas rumah tangga, tugas profesi serta tugas yang berkaitan dengan bergabungnya mereka pada partai politik. Kader perempuan memilih memprioritaskan tugas dalam rumah tangga daripada tugas yang lain. Dampak dari pilihan tersebut adalah kader perempuan menjadi lebih nyaman dengan posisinya sebagai pendukung yang baik dan bukan sebagai pesaing bagi kader laki-laki dalam memperoleh jabatan tertentu. Sebagian besar urusan yang tidak berkaitan dengan Perempuan, mereka serahkan kepada kader laki-laki.

Pada penelitian Tuasuun (2015), menggambarkan bahwa untuk meyakinkan petinggi-petinggi partai yang ternyata mayoritas adalah kaum laki-laki, perempuan calon legislatif harus bekerja ekstra dengan berbagai potensi dan kualitas yang dimiliki. Pengabdian terhadap partai dirasa sebagai faktor penting yang akhirnya membuat perempuan calon legislatif lolos dalam proses

kandidasi pada kontestasi politik. Tanpa pengabdian dan prestasi yang menonjol, tentu akan sulit untuk membawa perempuan calon legislatif lolos dikandidatkan.

Secara garis besar serangkaian proses selektif perempuan calon legislatif menggambarkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah publik sudah bukan lagi ruang imajiner. Artinya praktek demokrasi yang anti-diskriminasi (jenis kelamin) sekalipun masih embrio, mampu menghadirkan tatanan demokrasi yang emansipatif dan partisipatif dalam politik tanah air yang masih kental dengan tatanan-tatanan lama yang cenderung maskulin.

Selanjutnya Mujibussalim (2017), menyatakan bahwa partisipasi dan representasi perempuan dalam politik merupakan sebuah keharusan dari perspektif hak asasi manusia, karena lebih dari setengah penduduk dunia adalah perempuan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan di parlemen, pertama, faktor budaya yang ditumbuh kembangkan yang cenderung berpengaruh negatif terhadap partisipasi perempuan di dunia politik. Kedua, tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan. Ketiga, sistem pemilu dan sistem kuota belum memenuhi kuota 30% sesuai dengan ketentuan UU Pemilu.

Alasan yang mendasar tentang pentingnya representasi politik dalam partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam parlemen adalah untuk menempatkan demokrasi yang ramah gender (*gender democracy*). Kesadaran akan perlunya pelibatan perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan serta perencanaan kebijakan yang peka gender harus ditumbuhkan dalam masyarakat (Nurchahyo, 2016).

Kajian-kajian tentang peran perempuan dalam bidang politik sudah banyak dilakukan, namun masih kurang fokus pada sisi dilematis tentang partisipasi politisi perempuan dan bagaimana pemaknaan peran politisi

perempuan berdasarkan pengalaman yang dirasakan dan dialami dalam suatu kontestasi politik. Bagi perempuan yang sudah dikonstruksikan secara sosial dan politik mempunyai label-label tertentu dengan kecenderungan hanya berada di ranah privat dan tidak ada urusannya dengan ruang publik termasuk politik, ketika terjun ke dunia politik tantangannya menjadi semakin berat dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini akan menjadi masalah yang kompleks bagi seorang politisi perempuan ketika harus mengatur pola pikirnya sendiri, keluarganya serta lingkungan sosialnya terhadap pilihannya untuk berperan dalam kontestasi politik. Karena pertimbangan pemikiran inilah mengakibatkan banyak perempuan yang meragukan kemampuan sendiri dan seterusnya mereka memilih untuk mundur dari kontestasi politik dan kembali ke ranah domestik.

Budaya patriarki yang selalu mengungkung perempuan akan menjadikan kehidupan perempuan penuh dilema, tidak terkecuali bagi calon legislatif perempuan. Dari jumlah calon legislatif bahkan anggota legislatif perempuan terpilih sudah menunjukkan bahwa perempuan belum mampu menandingi laki-laki dalam hal representasi politik di legislatif. Salah satu penyebabnya karena dilema yang dialami perempuan antara pemaknaan diri sendiri, keluarga dan kehidupan sosialnya. Aktivitas para legislator yang menuntut banyak waktu di ruang publik, bertemu dengan banyak ragam manusia dengan segala kepentingan dan banyaknya waktu yang harus dihabiskan di ruang publik menjadi tantangan sendiri bagi perempuan. Totalitasnya akan berbeda dengan laki-laki karena perempuan juga dituntut untuk tidak meninggalkan urusan domestik.

Mendukung kenyataan yang ada dalam tatanan kehidupan sosial sekarang maka pernyataan dari Megawati Soekarnoputri perlu direnungkan.

Menurut Megawati mencari kader perempuan makin sulit. "Ada sebuah

fenomena yang terus berjalan, justru setelah kita merdeka kaum perempuannya semakin surut di bidang politik. Berbeda dengan ibu-ibu kita waktu mereka masih ikut berjuang dengan, tentunya bapak-bapak, itu sangat kelihatan gairah dan elannya untuk berkiprah di bidang politik,” Megawati meminta surutnya perempuan berpolitik ini perlu diteliti lebih dalam. Mengapa justru setelah negara punya konstitusi dan memberi hak berpolitik yang sama antara laki-laki dan perempuan justru dalam tatarannya makin sulit (*Tempo*, 8/03/2018)

Fenomena yang sama ini terjadi hampir di seluruh Indonesia termasuk di Sikka-NTT. Masyarakat Sikka adalah masyarakat patrilineal. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dilakukan sejak lahir. Dalam masyarakat Sikka, anak perempuan dianggap sebagai orang luar dan anak laki-laki dianggap sebagai orang dalam. Perbedaan sejak lahir ini akan berdampak pada perbedaan perlakuan, hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan sampai ia meninggal. Anak laki-laki lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, politik dan kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan perempuan menjadi subordinasi yang sangat dibatasi untuk mengakses dan mengembangkan diri sehingga lebih sedikit jumlah perempuan yang menjadi pemimpin atau terlibat dalam politik. Urusan memimpin dan urusan politik adalah urusan laki-laki.

Hal ini tidak sejalan dengan pemikiran golongan *liberalis*. Menurut golongan feminis liberalis, kebebasan dan keadilan berakar pada rasionalitas dan “perempuan adalah makhluk yang rasional” juga. Perbedaan antara nilai tradisional dan modern adalah letak permasalahannya. Mereka menganggap keterbelakangan dan ketidakmampuan kaum perempuan bersaing dengan laki-laki adalah karena kelemahannya sendiri akibat sikap irasional yang berpegang

teguh pada nilai-nilai tradisional. Konsekuensinya, ketidakadilan yang dipahami sebagai akibat struktur penindasan yang melahirkan ideology sexist yakni patriarki maupun struktur ekonomi dan politik yang didominasi oleh kaum laki-laki tidak pertanyakan (Fakih,2005)

Dari ulasan diatas, peneliti melihat bahwa partisipasi perempuan dalam politik masih sangat rendah, sementara kalau berbicara soal demokrasi harus dimulai dari dua pihak, laki-laki dan perempuan. Tidak ada demokrasi jika hanya mementingkan satu pihak sembari mengesampingkan pihak lain. Rendahnya peran politisi perempuan dalam kontestasi politik merupakan salah satu tema besar yang selalu muncul dalam diskursus mengenai reposisi peran perempuan dalam pembangunan dan politik. Salah satu aspek yang selalu muncul dalam diskursus ini adalah persoalan representasi kaum perempuan dalam struktur politik. Persoalan ini muncul terutama apabila membandingkan secara dikotomis dengan jumlah kaum perempuan yang populasinya secara kuantitas lebih banyak dari laki-laki. Di sisi lain pemerintah sudah menyediakan *affirmative action* (tindakan khusus sementara) dengan sistem kuota 30% bagi perempuan dalam undang-undang Pemilu. Namun hasil dari tindakan khusus ini masih jauh dari harapan. Ada banyak faktor yang menyebabkan representasi kaum perempuan dalam politik ini masih rendah, salah satu penyebabnya adalah dari perempuan sendiri. Hal ini menarik peneliti untuk melihat lebih jauh ke dalam diri para politisi perempuan, bagaimana para politisi memaknai peran mereka terhadap partisipasinya dalam kontestasi politik dengan berupaya mengungkap dan menggali dari pemahaman, motivasi serta pengalaman mereka. melihat fenomena yang dialami oleh para calon legislatif perempuan ketika para politisi perempuan ini terlibat dan berpartisipasi dalam kontestasi politik di Kabupaten

Sikka. Apakah para politisi perempuan membawa isu gender dan kepentingan perempuan dalam perjuangan mereka ataukah mereka memperjuangkan kepentingan masyarakat secara umum.

Dengan latar belakang diatas, maka penelitian ini menggunakan kajian fenomenologi, yang pada dasarnya berpandangan bahwa apa yang tampak dipermukaan, termasuk pola perilaku manusia sehari-hari, hanyalah suatu gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi di “kepala” sang pelaku. seperti yang dikatakan Faisal (1998). Perilaku apa pun yang tampak di tingkat permukaan baru bisa dijelaskan manakala bisa mengungkap atau membongkar apa yang tersembunyi dalam dunia kesadaran atau dunia pengetahuan si manusia pelaku.

Sebab, realitas itu sesungguhnya bersifat subjektif dan makna dan sangat bergantung, pada persepsi, pemahaman, pengertian dan anggapan seseorang. bahwa terbenam suatu kompleks gramatika kesadaran di dalam diri manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh (Seamon,2000:13) bahwa fenomenologilah mampu menangkap serta mengungkap pengalaman hidup seorang manusia dalam memaknai keberadaannya sebagai manusia dalam seluruh proses kehidupan yang dialaminya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan diatas maka rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana makna peran politisi perempuan bagi caleg perempuan dalam kontestasi politik di Sikka” ?

Dengan pertanyaan penelitian antara lain :

1. Bagaimana pemahaman calon legislatif perempuan terhadap peran politisi perempuan?

2. Bagaimana motivasi calon legislatif perempuan berpartisipasi dalam kontestasi politik?

3. Bagaimana pengalaman calon legislatif perempuan berpartisipasi dalam kontestasi politik?

4. Bagaimana seorang calon legislatif perempuan memaknai keberadaannya sebagai politisi perempuan dalam kontestasi politik.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memahami dan menganalisis pemahaman caleg perempuan terhadap peran politisi perempuan
2. Menjelaskan makna motivasi calon legislatif perempuan dalam kontestasi politik
3. Menjelaskan makna pengalaman calon legislatif perempuan dalam kontestasi politik
4. Mendeskripsikan makna keberadaan caleg perempuan sebagai politisi perempuan dalam kontestasi politik.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman tentang makna pengalaman peran politik perempuan
2. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya

Manfaat Praktis :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, manfaat dan motivasi kepada perempuan untuk semakin semangat dalam berpartisipasi dan mengembangkan diri dalam ranah politik

2. Bagi masyarakat ; adanya cara pandang yang baru terhadap perempuan, khususnya masyarakat Sikka dalam mendukung keterlibatan aktif perempuan dalam politik
3. Bagi Pemerintah ; dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang responsif gender, menggerakkan dan mengaktifkan perempuan dalam pembangunan khususnya di bidang politik di Kabupaten Sikka



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian terdahulu

Suatu tulisan yang menarik dari Nurwani Idris (2010) tentang *Phenomenon, Feminism and Political Self Selection for Women*, menurutnya demokrasi membutuhkan partisipasi semua warga negara baik wanita maupun pria. Hak politik yang telah diperoleh perempuan itu merupakan kerja keras dan perjuangan yang panjang dari para feminis. Karena perjuangan itulah maka sekarang perempuan memiliki kesempatan yang luas dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Semua negara di dunia telah meratifikasi hukum PBB untuk kebebasan politik bagi perempuan agar sama seperti laki-laki. Khususnya di Indonesia sekarang tidak ada hambatan formal bagi kepemimpinan perempuan, jika mereka memilih untuk berpartisipasi dalam politik. Tetapi itu adalah fenomena bagi perempuan di antara pemilihan diri dalam politik, kebebasan untuk berpartisipasi dan urusan domestik seperti mengurus anak-anak, suami, yang masih kuat. Satu penghalang "seleksi diri" atau "budaya dan agama" tanggung jawab secara signifikan. Dalam penelitian pada para Wanita Minangkabau yang matriakat ditemukan bahwa "seleksi diri" masih menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Tidak dapat dibantah bahwa kesadaran dan perjuangan perempuan dalam politik adalah hutang bagi kaum feminis - usaha tanpa henti. Kaum feminis telah mendorong perempuan untuk memberdayakan diri mereka sendiri agar mereka mencapai posisi yang

setara dibandingkan dengan rekan-rekan mereka, di hampir semua aspek kehidupan sosial. Dalam tulisan ini “seleksi diri” menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan termasuk politik. Perlu ditelusuri lebih dalam bagaimana pengalaman para perempuan ketika menyeleksi dirinya sendiri dan motivasi mereka untuk masuk dalam ranah kehidupan publik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani Adhi Suciptaningsih (2010) yang menyoroti partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif, mengeksplorasi bagaimana partisipasi perempuan dalam Lembaga Legislatif dan peran perempuan dalam penentuan kebijakan di Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal, menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal masih sangat rendah, dari 45 orang anggota dewan legislatif, hanya 4 orang saja yang perempuan. Padahal jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki. Rendahnya partisipasi perempuan ini disebabkan karena banyaknya kendala yang menghambat perempuan untuk maju berpartisipasi dalam lembaga legislatif, diantaranya kendala psikologis, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dari jumlah yang sedikit inipun tidak memiliki kompetensi yang baik untuk memperjuangkan keadilan gender dalam kebijakan. Akibatnya, banyak kebijakan publik yang belum berperspektif gender.

Vina Salviana (2014) dengan menggunakan metode interpretatif-interaksi menganalisis pengaruh ideologi politik budaya Jawa terhadap kehidupan politik perempuan Jawa. Dengan menganalisis kehidupan politik yang sering diatur oleh norma dan nilai berdasarkan perspektif

laki-laki dan dalam banyak kasus berdasarkan gaya hidup mereka.

Sebagai contoh, model politik yang didasarkan pada gagasan "pemenang dan pelonggaran", persaingan dan konfrontasi, tidak didasarkan pada semangat menghormati, kolaborasi, dan penciptaan konsensus. Hal-hal ini sangat bertolak belakang dengan dengan gaya wanita. Pola pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki tercermin dalam jadwal kerja anggota parlemen yang mengakibatkan politisi perempuan menghadapi banyak tekanan. Secara emosional, wanita tetap terikat dengan tugas-tugas rumah tangga, karena wanita merasa hal itu sebagai manifestasi atas cinta dan perhatian kepada keluarganya. Sementara disatu sisi sebagian besar program dan waktu pertemuan parlemen tidak ditolerir dan ditentukan oleh perspektif wanita.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa pola, yang pertama adalah keberadaan politisi perempuan yang ideologi politiknya kuat tetapi ideologi patriarkalnya telah berubah sebuah transisi yang mengakibatkan para politisi perempuan ini tidak seperti orang lain tetapi mendekati diri sendiri. Pola kedua adalah keberadaan politisi perempuan yang politis ideologi aliran lemah, tetapi ideologi patriarkalnya telah berubah menjadi transisi. Mereka yang berada dalam kategori ini ideologinya adalah aliran (santri) tetapi dengan orientasi rasional dan memiliki gerak diri (memiliki kekuatan politik) meskipun masih ada unsur lain sebagai istri atau ibu.

Selanjutnya pola ketiga adalah politisi perempuan yang menunjukkan bahwa ideologi patriarki telah lemah (transisi) dan ideologi politik juga telah berubah menjadi orientasi aspirasi akar rumput. Politisi perempuan dalam kategori lebih mandiri karena mereka tidak terlibat dalam peran

sebagai istri atau ibu-ibu, dan pola keempat adalah keberadaan politisi perempuan yang ideologi patriarkisnya masih menjadi ciri mereka dalam tindakan politik tetapi aliran politik mereka berorientasi ke yang rasional. Artinya dalam kategori ini politisi perempuan masih seperti yang lain di mana mereka masih terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, tetapi aliran ideologi politik mereka tidak kuat. Temuan diatas menunjukkan bahwa ada kemajuan dalam partisipasi politik perempuan di legislatif. Keberadaan politisi perempuan tidak lagi dianggap sepenuhnya lain; melainkan menuju subjek (diri). Proses demokrasi sudah lebih progresif meskipun berdasarkan pengalaman para politisi perempuan, mereka belum sepenuhnya menjadi diri sendiri karena masih ada banyak peran domestik yang harus dilakukan.

Amal Mohammad Ali El Kharouf dan Mohammad Al-Jribia (2017), menulis tentang evolusi partisipasi politik perempuan di berbagai kantor publik di Yordania, mendalami hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prosentase keterwakilan perempuan meningkat baik eksekutif maupun legislatif, yakni dari semula pada tahun 1993 (1,3%) meningkat cukup signifikan ke (12%) di tahun 2013. Hasil ini dapat tercapai karena pemerintah mendukung keterlibatan perempuan dalam partisipasi aktif politik, selain itu pemerintah memasukan isu perempuan dalam pengembangan. Perempuan Yordania akhirnya mampu menciptakan langkah besar dan sukses untuk peran mereka dalam kehidupan politik. Banyak perempuan yang akhirnya menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Studi ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadikan perempuan aktif dalam pemerintahan adalah kuota perempuan,

dukungan kesukuan, sikap dan kepribadian wanita yang kuat serta pengalaman yang didapat sebelumnya. Disamping kesuksesan yg diraih, ternyata masih ditemukan faktor penghambat yang membatasi perempuan untuk masuk dalam ranah politik yaitu dengan menggagalkan perempuan dalam pemilihan karena suku yang kadang masih menjamin kemenangan untuk pria dalam kesadaran politik yang terbatas, stereotip, ketrampilan perempuan yang kurang memadai juga keterbatasan finansial. Wanita Yordania berhasil mencapai kesuksesan kehidupan politik selama beberapa dekade terakhir, namun kerja keras masih dibutuhkan pada semua tingkatan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan yakni mengakses pengambilan keputusan ;posisi dengan persaingan langsung dan tanpa mengandalkan mekanisme “diskriminatif positif”

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Audra Jovani (2018) yang mendeskripsikan tentang potret perempuan anggota legislatif di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terpilih dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014. Dalam rangka implementasi *affirmative action* (kuota 30 persen) mengenai keterwakilan perempuan di parlemen sudah dilakukan sejak tahun 2004. Dengan menggunakan metode studi kasus dan analisis melacak proses ditemukan bahwa perempuan NTT yang berpartisipasi dalam pemilu 2014 mampu berkontribusi dalam mewujudkan keterwakilan perempuan di dalam partai politik dan parlemen berdasarkan latar belakang juga motivasi perempuan dalam mengikuti pemilu biarpun belum maksimal akibat pengaruh faktor kultural struktural. Hal ini sejalan dengan Anne Phillips (1995,6)

rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen terjadi karena faktor struktural dan faktor kultural. Faktor kultural disebabkan oleh stereotip negatif pada perempuan yang berdampak pada pembagian peran dan wilayah aktivitas berdasarkan gender. Sedangkan pada faktor struktural disebabkan adanya dominasi elit laki-laki dalam partai politik dan sistem politik yang tidak efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen.

Faktor kultural dan struktural inilah yang terjadi di NTT. Pada faktor kultural perempuan berperan dalam wilayah domestik (rumah tangga) sehari-hari, sedangkan laki-laki dipercayakan berperan dalam wilayah publik mengurus urusan politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan atau menyalahi norma dan kehendak sosial apabila berperilaku menyimpang dari norma dengan masuk ke dalam ranah politik. Penelitian ini tidak secara lebih mendalam menganalisis tentang bagaimana kedirian perempuan, pemaknaan mereka terhadap partisipasi politik dalam suatu kontestasi politik. mengapa perempuan tidak memiliki keberanian untuk masuk ke dalam ranah politik. Anggapan tentang kondisi perempuan yang seperti itu hanyalah gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi di "kepala" perempuan. Perilaku apa pun yang tampak di tingkat permukaan baru bisa difahami atau dijelaskan manakala bisa mengungkap atau membongkar apa yang tersembunyi dalam dunia kesadaran atau dunia pengetahuan perempuan. Sebab, realitas itu sesungguhnya bersifat subjektif dan sangat bergantung pada persepsi, pemahaman, pengertian dan anggapan seseorang.

Dari kajian penelitian terdahulu diatas, menunjukkan bahwa banyak penelitian yang sudah dilakukan tentang peran politisi perempuan dalam ranah politik. Tetapi, masih kurangnya fokus penelitian pada makna keberadaan seorang calon legislatif perempuan sebagai politisi perempuan dalam suatu kontestasi politik. Penelitian sebelumnya masih belum fokus pada pemahaman, motivasi dan juga pengalaman yang mendasari calon legislatif perempuan untuk memaknai peran mereka sebagai politisi perempuan. Hal tersebut membuat peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif fenomenologi dengan partisipan yang lebih terfokus. Sehingga nantinya penelitian ini akan mendapatkan data yang mendalam dari partisipan mengenai Pemahaman, motivasi dan pengalaman serta pemaknaan perempuan calon legislatif sebagai politisi perempuan dalam kontestasi politik dengan perspektif feminis liberal.

2.2. Perempuan dan Politik

2.2.1. Keterwakilan

Keterwakilan atau representasi merupakan hakikat dari proses demokrasi, dengan adanya pihak terwakil dan wakil segala proses politik terutama dalam bidang politik menjadi praktis dan efektif. Representasi penting kaitannya dengan nilai demokrasi dan keterwakilan perempuan terutama dalam peran strategis di bidang legislatif. Ide representasi politik muncul seiring dengan diintrodukirnya konsep dan praktek demokrasi (liberal) di berbagai negara.

Representasi politik menempatkan individu-individu di dalam sebuah lembaga yang dipilih oleh masyarakat untuk mewakili kepentingan mereka (Sherlock, 2006).

Hanna Pitkin (dalam Tremblay 2008) mengatakan bahwa konsep representasi politik adalah salah satu kontribusi utama dalam studi keterwakilan perempuan. Perspektif Pitkin ini mendefinisikan ada empat dimensi dalam keterwakilan politik yaitu formal, deskriptif, substantif dan simbolis seperti berikut ini:

Symbolic representation, which embodies an idea or an entity (e.g. a flag a king represents the nation); formal representation, which refers to institutional rules and procedures by which representatives are designed (i.e. the electoral regulation and the voting system); descriptive representation, which refers to the similarities and differences between representatives and the activities of representation (more specifically the responsiveness of the representative to the represented)

pengelompokan itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perwakilan formal (*formalistic representation*), dalam kategori ini perwakilan dipahami dalam dua dimensi, otoritas dan akuntabilitas. Dimensi pertama berkaitan dengan otoritas apa saja yang diberikan kepada para wakil sedangkan dimensi akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban dari para wakil tentang apa yang telah dikerjakannya.
2. Perwakilan deskriptif (*descriptive representative*), adanya para wakil yang berasal dari berbagai kelompok yang diwakili (*standing for*), meskipun tidak bertindak untuk diwakilinya.
3. Perwakilan simbolik (*symbolic representative*), para wakil merupakan symbol perwakilan dari kelompok yang diwakilinya.
4. Perwakilan substantif (*substantive representative*), para wakil berusaha bertindak sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak orang-orang yang diwakilinya.

Selanjutnya Jean Mansbridge (dalam Marijan,2015) juga mengelompokan perwakilan kedalam empat kategori, yang menjadi pijakan berkaitan dengan relasi antara wakil dan terwakil. penekanan Mansbridge lebih pada relasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat para wakil. Keempat kategori

itu adalah ; *promissory*, *anticipatory*, *gyroscopic* dan *surrogacy*. Perwakilan *promissory* adalah bentuk perwakilan dimana penilaian terhadap para wakil didasarkan pada janji-janji yang telah dibuat dihadapan konstituen pada saat kampanye. Kedua adalah perwakilan *anticipatory* adalah kebalikan dari yang pertama, yakni para wakil lebih berpikir tentang apa yang akan terjadi pada pemilu yang akan datang, bukan memperhatikan apa yang telah mereka janjikan pada saat kampanye. Ketiga adalah perwakilan *gyroscopic* adalah para wakil yang berangkat dari dalam diri sendiri, pengalaman sendiri, ketika membicarakan kepentingan dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan konstituen. Dan keempat adalah perwakilan *surrogacy* yaitu para wakil berusaha mewakili konstituen di luar daerah pemilihannya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa ketika memperbincangkan perwakilan, bukan sekedar pada relasi antara kelompok dan terwakili. ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama adalah adanya sekelompok orang yang mewakili, yang termanifestasi ke dalam bentuk lembaga perwakilan, organisasi, gerakan dan lembaga. Kedua, adanya sekelompok orang yang terwakili, seperti konstituen. Ketiga, adanya sesuatu yang diwakili, seperti pendapat , kepentingan dan perspektif dan yang terakhir adalah konteks politik dimana perwakilan itu berlangsung.

2.2.2. Peran Politisi Perempuan

Untuk mengetahui peran politisi perempuan dalam kontestasi politik di Sikka, terlebih dahulu harus diketahui pengertian dari peranan itu sendiri. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang tentu

memiliki peran masing-masing dalam suatu keadaan. Menurut Wolfman (1992)

makna peran sendiri dapat dijalankan lewat beberapa cara yaitu:

- a. Penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan seorang aktor dalam sebuah pentas drama.
- b. Penjelasan peran yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yaitu peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.
- c. Penjelasan lebih operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama sama berada dalam satu penampilan.

Menurut Suhardono (1994) peran dapat diartikan sebagai seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya).

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

- a. Peran aktif
- Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Maka peran perempuan menjadi penting dalam politik untuk mendukung kemajuan bangsa melalui berbagai kebijakan yang responsif gender.

Perempuan memiliki banyak peran baik di lingkungan sosial, ekonomi maupun keluarga. Peran-peran perempuan umumnya tidak terlepas dari konstruksi sosial. Walaupun saat ini telah banyak perempuan yang mengambil peran di luar rumah, namun konstruksi sosial masyarakat masih melekatkan peran utama perempuan di wilayah domestik yakni menjalankan peran reproduksi. Oleh karena itu, meskipun perempuan mengambil peran produksi (menghasilkan nilai ekonomi) dan bekerja di luar ranah domestik, namun perempuan tetap tidak meninggalkan perannya dalam menjalankan pekerjaan mereka sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak dan keluarga (Wahyuni, Jurnal 2017).

Selanjutnya menurut Soekanto (2010) menyatakan bahwa peranan mencakup tiga hal sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam aspek lain yang berhubungan dengan peranan, Soekanto juga menyebutkan bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis mengenai kedudukan (*status*). Maksudnya, peranan secara otomatis menunjukkan bahwa kedudukan atau status seseorang merupakan bentuk dari peranan yang dijalankannya. Jadi, dapat juga dikatakan bahwa peranan merupakan harapan yang diinginkan oleh individu atau kelompok masyarakat untuk melakukan sesuatu yang hasilnya dapat dirasakan bagi kepentingan bersama.

Dari pengertian tentang peranan tersebut di atas, pengertian peran yang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh calon legislatif perempuan dalam proses kontestasi politik di Sikka sebagai individu dalam masyarakat dan sebagai anggota organisasi. Hal tersebut dikarenakan perempuan yang terlibat dalam partai politik merupakan perempuan yang berangkat dari kemampuan aktualisasi individu yang diharapkan dapat mewarnai organisasi yang berdampak kepada kesejahteraan masyarakat khususnya bagi perempuan.

2.2.3. Kuota

Salah satu bentuk dari *affirmative action* (tindakan khusus sementara) adalah kebijakan kuota. Kuota merupakan prosentase minimal yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan dalam jabatan politik secara signifikan dapat merubah berbagai kebijakan-kebijakan politik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *International Parliamentary Union* (IPU), angka signifikan (atau biasa disebut dengan *critical numbers*) yang dapat mempengaruhi kebijakan politik adalah 30 persen (Soetjipto; 2005: 92). Jadi, kuota 30% adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan dan sebagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.

Selanjutnya menurut Soetjipto (2011) tujuan dari kebijakan afirmatif untuk perempuan dengan mekanisme kuota adalah untuk menambah jumlah wakil rakyat berjenis kelamin perempuan, yang mewakili identitas atau kelompok marginal serta mereka yang tersisih sehingga diharapkan asas keterwakilan akan bekerja optimal untuk mengubah agenda kebijakan dan menggeser prioritas kebijakan yang selama ini menjadikan kelompok-kelompok tersebut tersisih. Kebijakan afirmatif untuk perempuan dilandasi oleh pemahaman tentang politik berspektif gender yang dimaknai bukan hanya sebagai pertarungan gagasan (*politics of ideas*), tetapi juga kehadiran yang memberi makna (*politics of presence*). Kebijakan afirmatif di Indonesia baru sampai tingkat mendorong peningkatan jumlah perempuan, belum sampai pada upaya bagaimana keberadaan perempuan itu bermakna untuk bisa membuat proses politik yang transformatif seperti yang menjadi cita-cita dari perjuangan afirmatif di Indonesia.

Sistem kuota telah menghasilkan peningkatan jumlah yang signifikan dari perempuan dalam parlemen. Ada sejumlah metode kuota untuk memastikan bahwa perempuan bisa terwakili dalam parlemen yaitu, (a) kuota menurut undang-undang (*legal quotas*) dimana perempuan harus membentuk sekurang-kurangnya suatu proporsi minimal dari wakil yang terpilih, (b) Peraturan pemilihan yang mendesak partai politik untuk mengajukan sejumlah kandidat perempuan, (c) Partai politik secara sukarela melakukan sistem kuota bagi kandidat perempuannya (Karam, 1998)

Bagi kaum feminis liberal, laki-laki dan perempuan adalah setara dan oleh karena itu mereka harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarir dalam ranah publik, termasuk dalam ranah politik. Kuota adalah salah satu cara untuk mencapai kesetaraan tersebut mengingat selama ini kaum perempuan telah jauh tertinggal di berbagai bidang dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kuota, demikian Dahlerup dan Freidenvall (2005) menegaskan, dapat menjadi jalan pintas (*fast track*) bagi perempuan guna meningkatkan keterwakilan politik mereka.

2.2.4. Partisipasi Politik Perempuan

Sebelum membahas tentang partisipasi politik perempuan, terlebih dahulu perlu didefinisikan istilah partisipasi, partisipasi politik dan partisipasi politik perempuan. Partisipasi diartikan sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga publik dan mampu membedakan persoalan pribadi dan persoalan masyarakat. Tanpa partisipasi, hampir semua orang akan dikuasai oleh kepentingan pribadi mereka yang berkuasa.

Menurut McClosky (dalam Budiardjo,2012), adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui hal mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Selanjutnya Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalurkan.

Sementara menurut Rais,dkk (dalam Arjul Muh,2016) memaknai partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, ikut memberikan suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota partai politik. Dalam partisipasi ini bisa individual atau kelompok, terorganisir atau spontan, mantap atau sportif atau tidak efektif. Sedangkan menurut Faulks (2010), mendefinisikan partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi politik.

Partisipasi politik meletakkan masyarakat sebagai individu yang otonom dalam proses politik dan tindakan politik. dengan kata lain, individu dalam melakukan kegiatan politik atas inisiatifnya sendiri. Logikanya adalah *pertama*, partisipasi politik merupakan hak yang melekat pada warga negara sebagaimana hak politik lainnya. *Kedua*, partisipasi langsgng dalam dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat

menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. *Ketiga*, menjadikan partisipasi politik lebih bermakna (Suhirman, 2008)

Roth dan Wilson (dalam Budiardjo, 2008) menulis kegiatan partisipasi politik secara konvensional mencakup tindakan (1) Memberikan suara dalam pemilihan umum (*voting*), (2) Menghadiri rapat umum (*campaign*), (3) Menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, (4) Mengadakan komunikasi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Sedangkan kegiatan partisipasi politik yang berbentuk non-konvensional, berupa: (1) Pengajuan petisi, (2) Melakukan demonstrasi, (3) Melakukan konfrontasi, (4) Melakukan mogok.

Mencermati berbagai definisi partisipasi politik di atas, maka bisa diketahui bahwa partisipasi politik perempuan bisa berbentuk konvensional juga non-konvensional. Partisipasi perempuan dipengaruhi oleh peluang resmi apakah perempuan diberikan kesempatan untuk berada di wilayah politik. Dalam penelitian ini mau mendalami pengalaman partisipasi politik para calon legislatif perempuan sebagai politisi perempuan dalam kontestasi politik, karena partisipasi politik adalah hak yang melekat pada warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana hak politik lainnya.

2.3. Perempuan dan Politik dalam Perspektif Feminisme

2.3.1. Pengertian Feminisme

Secara konseptual feminisme mempunyai makna yang sangat variatif dan sulit untuk diintegrasikan dalam sebuah pemahaman utuh yang bersifat tunggal. Menurut Outhwaite (2008) mendefinisikan feminisme sebagai berikut :

“advokasi atau dukungan terhadap kesetaraan wanita dan pria, diringi dengan komitmen untuk meningkatkan posisi wanita dalam masyarakat. Pengertian ini mengansumsikan adanya kondisi yang tidak sederajat antara perempuan dengan pria, baik itu dalam bentuk

dominasi pria, ketimpangan gender, atau efek sosial dari perbedaan jenis kelamin”

Ritzer & Goodman (2004) mengartikan feminisme adalah sebuah generalisasi dari berbagai sistem gagasan mengenai kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif yang terpusat pada perempuan. Definisi ini mengarah pada sebuah kata kunci bahwa perspektif feminisme menempatkan perempuan sebagai pusat kajian dengan harapan dapat merubah sudut pandang yang selalu diwarnai oleh maskulinitas dan mengabaikan feminis.

Feminisme bukan saja merupakan sebuah gerakan tetapi lebih dari itu feminisme juga sebagai sebuah perspektif.. Sebagai sebuah perspektif feminisme berkontribusi dalam menggugat asumsi ilmu politik *mainstream* tentang kegiatan politik yang normal dan sepiantasnya (Surbakti,1996)

Selanjutnya menurut (Fakih, 2007), Feminisme dianggap sebagai usaha pemberontakan kaum perempuan untuk mengingkari apa yang disebut sebagai kodrat atau fitrah perempuan, melawan pranata sosial yang ada, atau institusi rumah tangga, seperti perkawinan dan lain sebagainya. Berdasarkan asumsi tersebut, gerakan feminisme tidak mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep feminisme tersebut perlu diluruskan. Pemahaman konsep terhadap feminisme yang sesuai diharapkan akan membuka cakrawala masyarakat tentang gerakan feminisme secara seimbang. Feminisme berarti memiliki sifat keperempuanan. Feminisme diwakili oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki yang terjadi di masyarakat. Akibat dari persepsi itu, timbul berbagai upaya untuk mengkaji ketimpangan tersebut serta menemukan cara untuk

mensejajarkan kaum perempuan dan laki-laki sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka sebagai manusia.

2.3.2. Teori Feminisme

Kekuatan terbesar dari perspektif teori feminisme terletak pada pengakuannya terhadap kompleksitas perilaku manusia dan kemampuannya memberikan sebuah tawaran pandangan dunia. Akar teori feminisme berasal dari berbagai macam disiplin, seperti Liberalisme, Marxisme, Sosialisme, Psikoanalisis, Eksistensialisme, Postmodernisme, dan Multikulturalisme. Meskipun para teorinya mempunyai kesamaan komitmen untuk memahami dan melawan setiap bentuk penindasan perempuan di masyarakat, mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai penyebab persoalan-persoalan, seperti subordinasi perempuan. Pandangan-pandangan para teori feminis terhadap persoalan tersebut tergantung pada perspektif pemikirannya (Tong, 2009)

Orang yang menganut paham feminisme ini disebut dengan feminis. Mereka terbagi-bagi menjadi beberapa aliran. Menurut buku *Feminist Thought* yang ditulis oleh Rosmarie Tong, ada delapan macam aliran feminisme yang dianut oleh para feminis. Diantaranya adalah: liberal, radikal, marxist/sosialis, psychoanalytic, *carefocused*, *multicultural/global/colonial*, *ecofeminist*, dan gelombang ketiga yang dikenal dengan postmodern. (Tong, 2009)

1. Feminis liberal

Aliran ini memandang diskriminasi wanita yang diperlakukan tidak adil. Wanita seharusnya memiliki kesempatan yang sama dengan pria untuk sukses di dalam masyarakat. Menurut feminis liberal, keadilan

gender dapat dimulai dari diri kita sendiri. Pertama, peraturan untuk permainannya harus adil. Kedua, pastikan tidak ada pihak yang ingin memanfaatkan sekelompok masyarakat lain dan sistem yang dipakainya haruslah sistematis serta tidak ada yang dirugikan. (Tong, 2009)

2. Feminis Radikal

Aliran ini menganggap sistem patrialisme terbentuk oleh kekuasaan, dominasi, hirarki, dan kompetisi. Namun hal tersebut tidak bisa direformasi dan bahkan pemikirannya harus dirubah. Feminis radikal fokus kepada jenis kelamin, gender, dan reproduksi sebagai tempat untuk mengembangkan pemikiran feminisme mereka. (Tong, 2009)

3. Feminis Marxis dan Sosialis

Feminis Marxis dan sosialis menyatakan kalau mustahil bagi siapapun, terutama wanita untuk mencapai kebebasan yang sesungguhnya di tengah masyarakat yang menganut sistem yang berdasarkan kelas, dimana kekayaan diproduksi oleh orang yang tak punya kekuatan yang dikendalikan oleh sedikit orang yang mempunyai kekuatan. (Tong, 2009)

4. Feminis psikoanalisis fokus kepada karya-karya Sigmund Freud untuk lebih mengerti peran jenis kelamin di dalam kasus penindasan terhadap wanita. (Tong, 2009)

5. Feminis *care - focused* membahas hal-hal mengapa wanita dihubungkan dengan ketergantungan, komunitas, dan hubungan.

Sedangkan pria dikaitkan dengan ketergantungan, kemandirian, dan

otonomi. Para pemikir ini menganggap bahwa di dalam masyarakat ada perbedaan kenyataan antara “feminis” dan “maskulin”. (Tong, 2009)

6. Feminis *multicultural/global/postcolonial* berfokus pada penyebab dan penjelasan terhadap kedudukan wanita yang berada di bawah pria di seluruh dunia. Feminis aliran ini terkenal memiliki komitmen yang kuat untuk menekankan perbedaan di antara wanita dan mengidentifikasi berbagai macam wanita agar dapat bekerjasama dengan baik. (Tong, 2009)

7. Feminis aliran *ecofeminists* menekankan pada titik kalau kita tidak hanya terhubung terhadap sesama manusia, tetapi kepada makhluk lain seperti hewan atau bahkan tumbuhan. (Tong, 2009)

8. Feminis Postmodern atau gelombang ketiga memiliki pemikiran untuk menghapuskan perbedaan antara maskulin dan feminin, jenis kelamin, wanita dan pria. Mereka mencoba menghancurkan konsep para kaum pria yang mencegah wanita untuk memposisikan dirinya dengan pemikirannya sendiri dan tidak mengikuti pemikiran pria. (Tong, 2009)

Pada penelitian ini pemaknaan calon legislatif perempuan sebagai politisi dalam kontestasi politik akan dikaji dengan perspektif feminis liberal. Feminisme liberal, melihat bahwa hakikat manusia terletak pada kesadaran, keunikan pada setiap individu, dan untuk menjadi bebas manusia harus menggunakan rasio karena rasionalitas sangat penting untuk mencapai kebebasan. Penalaran rasio penting untuk mengerti prinsip-prinsip moralitas yang dapat menjamin otonomi manusia dan

Feminisme liberal tidak pernah mempertanyakan bentuk diskriminasi akibat ideologi patriarki. Sejak awal aliran feminisme liberal menganggap bahwa persoalan perempuan dianggap sebagai suatu masalah bagi perekonomian modern atau partisipasi politik maupun pembangunan.

Asumsi dasar feminisme liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan dan publik (Mansour Fakh, 2005: 81). Antara dunia perempuan dan dunia laki-laki terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu kerasionalitasan. Laki-laki menganggap bahwa kaumnyalah yang memiliki daya rasionalitas yang tinggi, perempuan tidak memiliki hal tersebut. Sehingga dalam hak juga mengalami perbedaan. Antara laki-laki dan perempuan tidak selayaknya memiliki hak yang sama, apalagi di dunia perpolitikan. Kerangka kerja feminis liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada kesempatan yang sama dan hak yang sama bagi setiap individu, termasuk di dalamnya kesempatan dan hak perempuan.

Perjuangan feminis liberal terutama untuk membebaskan perempuan dari penindasan peranan gender, yaitu peranan yang diberikan kepada perempuan karena berdasarkan jenis kelaminnya. Peranan ini pada gilirannya memberikan pembenaran atas pemberian tempat yang lebih rendah untuk perempuan atau bahkan tidak memberikan tempat sama sekali. Bagi feminis liberal upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi perempuan diperjuangkan terutama melalui pendekatan legalitas. Agenda kaum feminis liberal memperjuangkan hak-

hak perempuan di bidang politik, pendidikan dan kerja, dan ini ditempuh melalui jalur hukum dengan cara mereformasikan sistem yang ada.

Sedangkan agar perempuan teremansipasi dan terbebaskan dari keterkungkungan sosial, kalangan liberal menganjurkan untuk mempraktekan androgini di dalam diri perempuan dan laki-laki (Arivia, 2003)

Aliran Feminisme liberal menganggap bahwa kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan adalah sangat penting bagi mereka. Oleh karena itu sebenarnya tidak perlu pembedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Asumsinya karena perempuan juga merupakan makhluk rasional, perempuan juga bisa berpikir kritis, seperti halnya anggapan yang ditujukan pada laki-laki, bahwa laki-laki adalah makhluk rasional.

Oleh karena itu ketika membahas tentang mengapa kaum perempuan dalam keadaan terbelakang dan tertinggal dalam berperan, mengakses dan mengontrol aspek kehidupan, feminisme liberal beranggapan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dari kaum perempuan itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa apabila mereka kaum perempuan sudah diberikan kesempatan dan hak yang sama dengan laki-laki, maka jika kaum perempuan tidak mampu dan tidak sanggup bersaing dan mengalami kekalahan, yang perlu disalahkan dalam hal ini adalah kaum perempuan itu sendiri.

2.4. Kajian Fenomenologi

Fenomenologi pertama kali dikenalkan oleh Edmund Husserl pada awal abad ke-20, sehingga dia dijuluki sebagai "*father of phenomenology*".

Sebagai sebuah perspektif baru yang keluar dari mainstream positivistik, fenomenologi mendapat banyak tantangan dalam aplikasinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan

Fenomenologi sebenarnya lebih merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat dibandingkan suatu aliran filsafat. Oleh karena itu, sebagian kalangan berbicara tentang gerakan fenomenologis (*phenomenological movement*), yakni gerakan internasional di bidang filsafat yang meluas ke berbagai disiplin ilmu, terutama sosiologi, antropologi, dan psikiatri, kemudian komunikasi. Berawal di Jerman menjelang akhir abad ke-19, gerakan yang dirintis oleh Edmund Husserl ini kemudian meluas ke Eropa, America dan Asia termasuk Indonesia.

Sebagai suatu gerakan dalam berpikir, fenomenologi (*phenomenology*) dapat diartikan sebagai upaya studi tentang pengetahuan yang timbul karena rasa kesadaran ingin mengetahui. Objek pengetahuan berupa gejala atau kejadian-kejadian dipahami melalui pengalaman secara sadar (*conscious experience*). Fenomenologi menganggap pengalaman yang aktual sebagai data tentang realitas yang dipelajari. Kata *gejala* (phenomenon yang bentuk jamaknya adalah phenomena) merupakan asal istilah fenomenologi dibentuk, dan dapat diartikan sebagai suatu tampilan dari objek, kejadian, atau kondisi-kondisi menurut persepsi (Littlejohn, 2002). Dari sini, tampak bahwa sebagian esensi dari fenomenologi sebenarnya adalah pendekatan kualitatif terhadap gejala dan atau realitas yang diteliti

Dimiyati (2000), dengan menyadur beberapa gagasan Husserl, menyatakan bahwa fenomenologi merupakan analisis deskriptif dan

instropektif tentang kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman langsung yang meliputi inderawi, konseptual, moral, estetis dan religius. Fenomenologi adalah suatu metode yang secara sistematis berpangkal pada pengalaman dan melakukan pengolahan-pengolahan pengertian. Manusia adalah makhluk yang melakukan komunikasi, interaksi, partisipasi dan penyebab yang bertujuan. Kekhususan manusia terletak pada intensionalitas psikisnya yang ia sadari., yang dikaitkan dengan dunia arti dan makna. Dunia makna manusia dapat diteliti dengan metode fenomenologi.

Fenomenologi sebagai sebuah filsafat sekaligus merupakan metode penelitian, di dalam fenomenologi terdapat dua unsur utama, yaitu (*descriptive* dan *interpretive*). *Descriptive* berarti mendeskripsikan karakteristik fenomena secara umum, sedangkan *interpretive* adalah memahami dan menafsirkan pengalaman individu sebagai partisipan. Pengalaman-pengalaman tersebut berhubungan dengan lingkungan sosial, budaya dan politik dari responden. Fenomenologi mencakup 4 pemaknaan dari kehidupan manusia, yaitu : *Lived Body*, *Lived Space*, *Lived Time*, and *Lived Relationship*. *Lived Body* mengarah pada pemaknaan terhadap tubuh sebagai entitas dan media untuk melebur menjadi satu di dalam dunia. *Lived Space* mengarah pada pemaknaan ruang-ruang dimana tubuh menempatnya sebagai bagian dari aktivitas dalam hidupnya. *Lived Time* mengarah pada pemaknaan waktu yang mencakup masa lalu, masa sekarang dan masa depan dari persepsi dan pengalaman partisipan. Sedangkan *Lived Relationship* mengarah pada pemaknaan hubungan

antara responden dengan berbagai pihak di luar tubuh responden, mencakup keluarga, masyarakat, institusi, dan budaya.

2.4.1 Filsafat Fenomenologi Husserl

Sebagai pendirinya, Husserl mendefinisikan secara singkat mengenai fenomenologi, yaitu *“the study of the essence of conscious experience”*. Husserl menekankan bahwa peneliti harus mampu meninggalkan pengetahuan terdahulu yang dimilikinya untuk benar-benar melebur ke dalam pengalaman partisipan. Husserl memperkenalkan prinsip *Epoché*, yaitu proses ‘mengurung’ dan ‘menunda’ terlebih dulu tentang semua pengetahuan dan asumsi yang dimiliki untuk benar-benar menjadi satu dengan pengalaman hidup partisipan.

Menurut Campbell (dalam Sukidin 2002), metode Husserl dimaksudkan untuk memeriksa dan menganalisis kehidupan batiniah individu, yakni pengalamannya mengenai fenomena atau penampakan sebagaimana yang terjadi dalam apa yang disebut “ arus kesadaran”. Husserl bertolak dari pengandaian bahwa pengalaman tidak hanya diberikan pada individu melainkan bersifat intensional. menurut Husserl bahwa kita dapat membersihkan diri dari prasangka-prasangka kita yang terkumpul mengenai dunia dan mereduksi pengalaman kita sampai pada unsure dasar dari pengalaman itu.

Selanjutnya Sudarto (dalam Rahman 2013), mengemukakan bahwa Husserl mengajukan sebuah metode fenomenologi yang disebutnya dengan istilah reduksi. Reduksi dapat dipahami sebagai penyaringan, *epoche* (menanggukhan) dan *eingeklemmt* (meletakan). Reduksi ini

diperlukan supaya realitas dapat dilihat dengan semurni-murninya. Reduksi ini disebut Husserl dengan beberapa istilah dan tingkatan sebagai berikut :

1. *Reduksi fenomenologi*, Reduksi ini menyaring setiap naif terhadap objek yang diamati. Keputusan naif yang perlu disaring ini adalah segala sesuatu yang bersifat subyektif. Artinya reduksi ini menekankan objektivitas sebuah pengamatan, yakni terbuka pada fenomena yang diamati. Dalam reduksi fenomenologis ini, subyek harus benar-benar mengosongkan dirinya dari segala hipotesis agar objek dapat menampakan diri apa adanya.
2. *Reduksi eidetis*, Reduksi ini dilakukan setelah obyek menampakan diri apa adanya. Perlu diketahui, objek yang menampakan diri apa adanya belum tentu menampakan intinya atau hakikatnya. Oleh karena itu harus dilakukan reduksi eidetis, yaitu menyaring semua yang bukan inti atau hakikat (eidos) dari subjek itu sendiri. Disinilah fenomenologi menegaskan bahwa dirinya adalah ilmu yang ingin melihat intisari atau hakikat segala sesuatu.
3. *Reduksi Transendental*, Reduksi ini ingin menjernihkan subyek yang mengamati. Subyek harus benar-benar terbuka dan murni, sehingga tidak ada kesempatan untuk meragukan apa yang diamatinya. Perlu penyaringan terhadap segala sesuatu yang tidak memiliki hubungan timbal balik antara subyek dan obyek. pada akhirnya reduksi transendental ini, pemisahan atau pembedaan subyek dan obyek menjadi terhapus. Yang tersisa adalah meleburnya subyek dan obyek sebagai kesatuan murni.

Demikianlah tiga tingkatan metode reduksi untuk menghasilkan yang murni. Dalam hidup ini manusia terbiasa bersikap menerima segala sesuatu apa adanya (*taken for granted*). Kebanyakan orang tidak pernah mempersoalkan apakah pengetahuan yang dimilikinya benar-benar pengetahuan yang murni betul-betul realitas itu sendiri atau hanya sekedar fatamorgana yang menurut Husserl dianggap *naturliche einstellung* (sikap alamiah), yaitu kepercayaan yang naif bahwa segala sesuatu ada begitu saja. Fenomenologi menolak sikap natural ini).

2.4.2. Filsafat Fenomenologi Heidegger

Martin Heidegger memperdalam kajian fenomenologi ke arah makna eksistensi keberadaan manusia. Heidegger menyebutnya sebagai *Dasein*: "*Self and tahap, world belong together in the single entity Dasein*".

Menurut Hardiman (2003), Secara umum, pemikiran Heidegger dibagi menjadi dua tahap. tahap pertama sampai pada *Sein und Zeid* (ada dan Waktu), sedangkan tahap kedua merupakan perkembangan dari pemikiran setelah Ada dan Waktu. Walaupun dibagi menjadi dua tahap, tidak berarti tahap kedua dipahami sebagai pemutusan terhadap pemikiran tahap pertama, melainkan keduanya saling melengkapi. Perbedaannya terletak pada focus kajian dan pembalikan pemikiran. Fokus kajian tahap pertama pada analisis *Dasein*, sedangkan tahap kedua pada soal ada. Sementara itu, pembalikan dapat dipahami dengan, jika tahap pertama diuraikan bahwa *Dasein* yang menanyakan tentang Ada, maka tahap kedua Ada menampakkan diri pada *Dasein*.

Tahap pertama merujuk langsung pada pemikiran Heidegger yang tertuang dalam Ada dan Waktu. Ada dipertanyakan melalui pendekatan

fenomenologi. Ada perlu dipertanyakan ulang karena Ada telah dilupakan, bahkan melupakan kelupaan akan-Ada. Mengapa Ada dilupakan? Heidegger mengungkapkan perbedaan ontologis oleh antara *Sein* (Ada) *Seindes* (mengada). Menurutnya para filsuf hanya berada pada taraf mengada-mengada bukan Ada itu sendiri. Oleh karena itu Ada dilupakan.

Adapun yang dimaksud dengan mengada-mengada adalah segala entitas yang ada seperti benda-benda, pikiran, perkataan, tulisan, ideology-ideologi dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan Ada adalah mencakup segala entitas mengada-mengada. Ada dapat dianggap sebagai kesatuan atau keumuman Mengada-mengada. Akan tetapi menurut Heidegger, ada melampaui segala bentuk cakupan dan keumuman. Ada bersifat transcendental atau melampaui segala entitas Mengada-mengada. Berkat Ada, Mengada-mengada menjadi ada. Jadi, Ada menopang Mengada-mengada.

Manusia adalah satu-satunya mengada yang mempertanyakan Ada, karena manusia mempunyai kegelisahan akan Ada-nya dan kebersamaan makhluk-makhluk lain di dunia ini. Kata "manusia" oleh Heidegger disebut sebagai *Dasein* (Ada di sana). Maksudnya manusia ada begitu saja disana, di suatu tempat serta mempertanyakan Ada-nya. Dengan demikian, *Dasein* tidak seperti benda lainnya seperti batu, pohon dan lain sebagainya.

Dasein bisa mengingat Ada, tetapi pada saat yang sama bisa melupakan Ada. Orang-orang (*das man*) yang larut dalam kesibukan kesehariannya bisa melupakan Ada. *Dasein* yang mau mencandra kesibukan kesehariannya dalam momen eksistensial dapat melihat Ada.

Heidegger menjelaskan struktur-struktur dasarnya eksistensi manusia seperti rasa cemas, takut dan prihatin untuk mengungkap keotentikan keberadaan manusia.

Sedangkan pemikiran Heidegger pada tahap kedua terpusat pada persoalan Ada. Heidegger tidak lagi membahas persoalan *Dasein* yang mempertanyakan Ada, melainkan Ada yang menyingkapkan diri pada *Dasein*. Ia mengangkat seluruh kenyataan termasuk subyek atau kesadaran sebagai realitas yang terus menerus direfleksikan. dan, Heidegger menyarankan dihadapan Ada, hnedaknya manusia mengambil sikap membuka diri.

2.4.3. Perspektif Fenomenologi Schutz

Menurut Alfred Schutz, tugas fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari dan dari kegiatan dimana pengalaman dan pengetahuan berakar Craib (dalam Sukidin 2002). Fenomenologi tertarik dengan pengidentifikasian masalah dari dunia pengalaman inderawi yang bermakna kepada dunia yang penuh dengan obyek-obyek yang bermakna., suatu hal yang semula terjadi dalam kesadaran individu secara terpisah, dan kemudian secara kolektif, di dalam interaksi antara kesadaran-kesadaran. Mengkontruksi makna diluar arus utama pengalaman dengan melalui proses tipikasi. Hubungan-hubungan makna diorganisir secara bersama, juga melalui proses tipikasi atau di sebut *stock of knowledge*. Kumpulan pengetahuan memiliki kegunaan praktis dari dunia itu sendiri, bukan sekedar pengetahuan tentang dunia.

Selanjutnya menurut Schutz, manusia adalah makhluk sosial. Akibatnya kesadaran akan kehidupan sehari-hari adalah sebuah kesadaran sosial. Dunia individu merupakan sebuah dunia intersubjektif dengan makna beragam dan rasa dalam kelompok. Kita dituntut untuk saling memahami antara satu sama lain dan bertindak dalam kenyataan yang sama. Ada penerimaan timbal balik dan pemahaman atas dasar pengalaman yang bersamaan dan tipikasi bersama atas dunia bersama. Melalui proses tipikasi diri, kita belajar menyesuaikan diri ke dalam dunia yang lebih luas, dengan melihat diri kita sendiri sebagai orang yang memainkan peran dalam situasi tipikal. Dalam kehidupan bermasyarakat, individu dapat memakai symbol-simbol yang di warisnya untuk memberi makna pada tingkah lakunya sendiri. Jadi pandangan deskriptif dan interpretatif tentang tindakan sosial dapat diterima hanya jika tampak masuk akal bagi pelaku sosial yang relevan.

Fenomenologi sebagai sebuah filsafat dan metode mampu menangkap pengalaman hidup seseorang dengan sangat mendalam. Terdapat enam prinsip yang harus mendasari sebuah penelitian fenomenologi, yaitu :

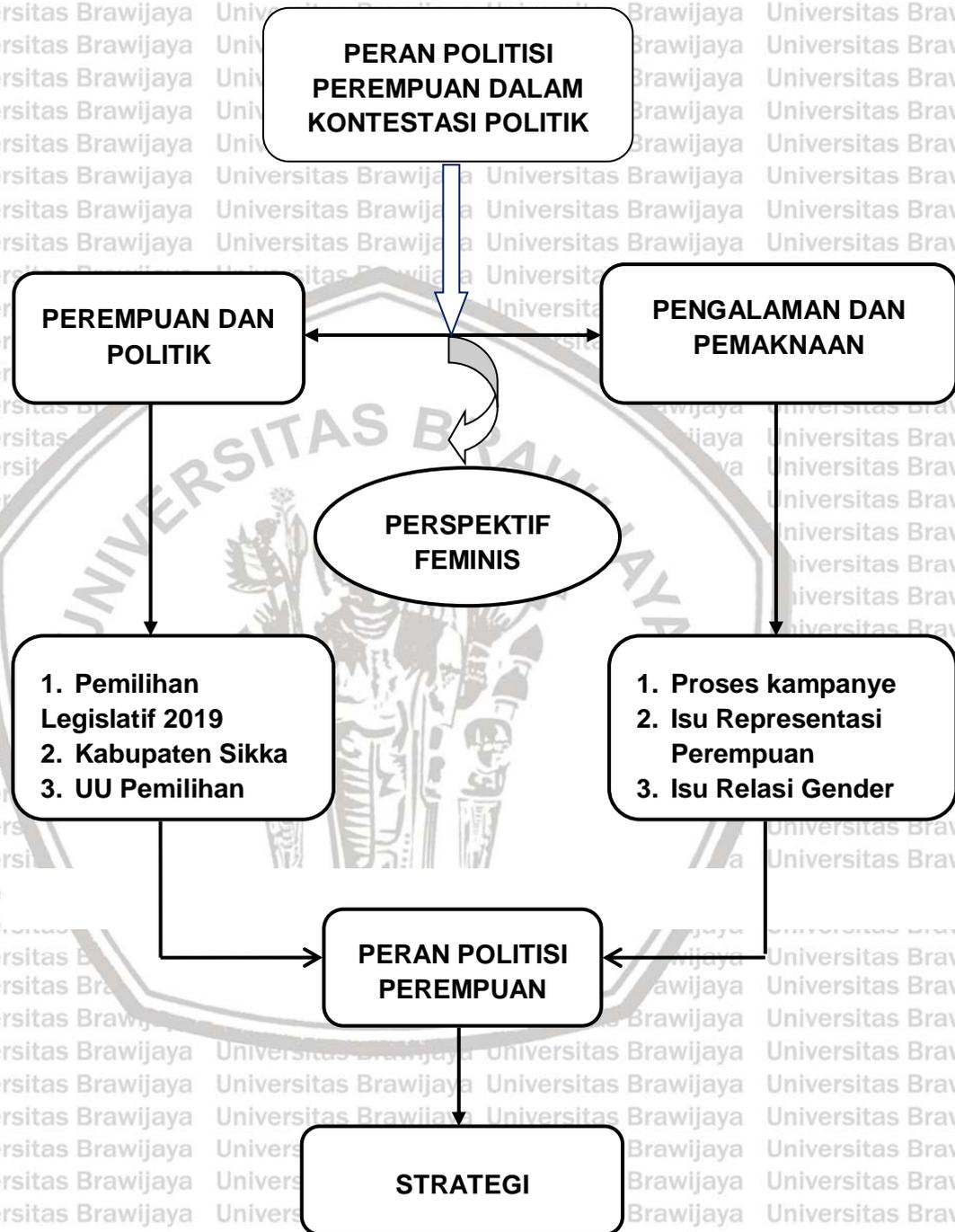
- Fokus terhadap pemaknaan dan pengalaman hidup.
- Menggunakan penjelasan yang teliti, mendalam dan kaya data.
- Memusatkan perhatian pada isu-isu keberadaan manusia.
- Mengasumsikan bahwa manusia dengan dunianya adalah satu entitas yang melebur menjadi satu tanpa bisa dipisahkan.
- Menerapkan sikap-sikap fenomenologi, seperti "*Epoche*, tertarik dan antusias terhadap cerita partisipan, menganggap partisipan adalah sumber utama dimana informasinya sangat dibutuhkan dan lain-lain.

- Menerapkan strategi pendekatan hubungan yang dibangun antara partisipan dan peneliti untuk bisa menjalin hubungan yang saling mempercayai.

Semua prinsip di atas harus diterapkan dalam sebuah penelitian fenomenologi untuk mampu mendapatkan data yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



2.4. Kerangka Konseptual



2.1. Gambar Kerangka Konseptual

Sumber : Olahan Peneliti 2018





BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang meliputi jenis dan desain, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, subyek subyek penelitian / partisipan, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan etika penelitian.

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk menentukan arah kegiatan dalam melakukan sebuah penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di kemukakan pada Bab I, maka pendekatan yang tepat untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Basrowi, 2008). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pemahaman tentang pengalaman hidup dan mengeksplorasi, menemukan, menguraikan makna dari pengalaman yang terjadi pada individu dalam hidupnya (Moleong, 2011).

Model Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu fenomenologi (*phenomenology*). Fenomenologi adalah jenis penelitian kualitatif yang dipelopori oleh Husserl dan dilanjutkan oleh muridnya Heidegger. Metode ini mampu mengungkap kedalaman pemaknaan diri dan pengalaman hidup dari seorang manusia.

Pendekatan fenomenologi yang digunakan adalah fenomenologi sosiologi, oleh karena itu fokus perhatiannya mencari kesamaan makna-makna intersubyektif diantara partisipan dan merumuskan tipe-tipe umum

pengalamannya. Beberapa konsep dasar yang digunakan antara lain kesadaran, pengalaman, tindakan rasional, makna-makna subyektif, makna intersubyektivitas dan pemahaman rasional dari para partisipan. Dengan menggunakan metode pemahaman *verstehen* yakni mengetahui makna tindakan antara partisipan dan selanjutnya dikontraskan guna mendapatkan makna peran bagi para calon legislatif perempuan sebagai politisi perempuan dalam kontestasi politik di Sikka.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sikka-NTT sebagai batasan situs kajian Peran Politisi Perempuan dalam kontestasi Politik, alasan pemilihan berdasarkan pertimbangan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sikka yang belum mampu memenuhi kuota 30% perempuan dalam parlemen, sedangkan jumlah penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada laki-laki. Waktu yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah tiga bulan, dimulai sejak bulan Desember 2018 hingga bulan Februari 2019.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis atau dapat dikatakan jenis dan bentuk data yang akan diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini fokusnya adalah mencari makna pemahaman calon legislatif perempuan terhadap peran politisi perempuan, Motivasi dan Pengalamannya menjadi politisi perempuan untuk selanjutnya dapat mengungkap makna peran bagi seorang politisi perempuan dalam berpartisipasi pada kontestasi politik di Kabupaten Sikka.

3.4 Subjek Penelitian / Partisipan

Di dalam teknik penentuan informan, penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Herdiansah (2015) merupakan teknik penentuan informan berdasarkan kepada ciri-ciri subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Informan yang dimaksud adalah politisi perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Partisipan dalam penelitian ini adalah politisi perempuan yang memenuhi beberapa kriteria inklusi sebagai berikut :

1. Calon legislatif perempuan yang sementara menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sikka periode 2004-2019.
2. Calon legislatif perempuan yang gagal dalam pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Sikka periode 2004-2019
3. Calon legislatif perempuan yang akan mengikuti kontestasi politik dalam pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Sikka periode 2019-2024

Berikut partisipan yang telah menyetujui untuk terlibat dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Daftar Partisipan Penelitian

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Tingkat Pendidikan	Status
1	MLD	49	Ibu RT	SLTA	Menikah
2	YKP	42	Wiraswasta	SLTA	Menikah
3	MYS	53	Politisi	SLTA	Menikah
4	HDN	63	Pensiunan	Sarjana	Menikah
5	MAO	43	Wiraswasta	SLTA	Menikah
6	RMP	43	Wiraswasta	Sarjana	Menikah
7	TAD	55	Ibu RT	Diploma III	Menikah



3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip fenomenologi. Peneliti tidak mengalami kesulitan memasuki situs penelitian karena peneliti adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sikka yang mengenal partisipan dengan baik karena merupakan bagian tugas dan fungsi dari pekerjaannya, disamping peneliti memiliki ketertarikan secara konseptual yang kuat terhadap permasalahan penelitian ini.

Instrumen penelitian yang digunakan untuk membantu proses pengambilan data yaitu pedoman wawancara dan alat perekam suara. Pedoman wawancara pada penelitian untuk membantu peneliti dalam memfokuskan proses wawancara kepada ipartisipan sesuai dengan fokus penelitian. Pada proses wawancara, pedoman ini terjadi banyak perubahan, dikembangkan dan disesuaikan agar bisa menjawab tujuan penelitian.

Selain pedoman wawancara, peneliti menggunakan alat perekam suara untuk merekam dan menyimpan hasil wawancara peneliti dan partisipan penelitian. Peneliti menggunakan perekam suara yang terdapat pada *handphone* Samsung Galaxy Prime.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi 3 metode meliputi:

1) Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *in-depth interview* atau wawancara mendalam. Peneliti menggali dan menemukan informasi

yang ada dalam pemikiran partisipan. Oleh karena itu, wawancara dilakukan secara terbuka dengan pertanyaan tidak terstruktur tetapi tetap berfokus pada fokus penelitian yang telah ditetapkan untuk memperoleh pandangan dari masing-masing partisipan.

Wawancara mendalam pada penelitian ini merupakan teknik utama dalam pengumpulan data. Wawancara dilakukan pada partisipan yang telah ditentukan oleh peneliti yang telah menandatangani *inform consent* penelitian sebagai bentuk kesediaan partisipan sebelum diwawancarai. Waktu pelaksanaan wawancara disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh partisipan, dengan lamanya wawancara berkisar 30-60 menit. Setelah wawancara dilaksanakan, peneliti membuat transkrip data yang sesuai dengan tuturan yang disampaikan oleh partisipan.

2) Observasi

Dalam penelitian ini, observasi memiliki kedudukan sebagai penguat data yang diperoleh disamping melakukan wawancara. Observasi dilakukan selama wawancara berlangsung. Para partisipan pada umumnya merupakan pejuang perempuan yang tergabung dalam berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sikka. Oleh karena itu selama proses penggalan data sangat membantu peneliti untuk observasi mendalam terkait kondisi lingkungan, latar belakang keluarganya, gesture, respon dan juga gerakan tubuh dari partisipan. Hal ini bertujuan untuk melakukan validasi terhadap ungkapan yang disampaikan partisipan.

3) Studi Dokumen.

Studi dokumen digunakan peneliti sebagai penunjang hasil data yang diperoleh. Dokumen yang dimaksud berupa buku, artikel media massa dan jurnal.

3.7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan diolah agar menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami dalam menganalisis rumusan masalah atau untuk menggambarkan kondisi dalam sebuah penelitian. Data yang didapatkan dari wawancara mendalam dan observasi dianalisis dengan *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Menurut (Polit & Beck, 2012), IPA berfokus pada 3 prinsip kunci yaitu : 1) menyelidiki fenomena pengalaman individu, 2) memerlukan interpretasi yang intens dan keterlibatan dengan data yang diperoleh, 3) menganalisis data secara rinci

Dalam analisis ini terdapat 6 tahapan yang dilakukan, meliputi:

- 1) Pada tahap pertama ini peneliti memindahkan transkrip wawancara dari data berbentuk audio (suara) menjadi data dalam bentuk tulisan (transkrip data). Selanjutnya hasil transkrip wawancara tersebut di baca dan dibaca kembali untuk mengetahui isi dari wawancara dan makna yang terkandung yang kemudian akan dianalisis.
- 2) Tahap berikutnya menganalisis isi dari kata, kalimat dan bahasa yang digunakan partisipan. Proses analisis tahap 1 dan 2 ini saling melebur dan melengkapi. Peneliti memberikan cetak tebal pada kata-kata yang mempunyai potensi menunjukan atau mengarahkan pada sub-sub tema dan tema.

3) Tahapan selanjutnya, peneliti melakukan analisis lanjutan dari tahap 2 yang membantu mengidentifikasi tema-tema. Proses ini dimulai dengan pembuatan kategori kemudian menyusun sub-sub tema sehingga menghasilkan tema dan dilanjutkan dengan sub tema yang lainnya sehingga tersusun sebuah tema yang menggambarkan pengalaman politisi perempuan dalam kontestasi politik

4) Berikutnya peneliti mencari hubungan antar tema-tema yang muncul. Peneliti menetapkan tema-tema dalam transkrip dan tema-tema telah diurutkan secara kronologis. Setelah itu hubungan antar tema ini di *mapping* untuk mulai memikirkan tema-tema yang berhubungan satu dan yang lain.

5) Tahapan 1-4 dilakukan pada setiap partisipan, setiap data yang diperoleh dari partisipan dianalisis dengan cara yang sama hingga selesai.

6) Tahap akhir dalam analisis ini adalah mencari hubungan antara tema yang muncul dari setiap partisipan.

3.8. Uji Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan pada suatu penelitian. Pada penelitian kualitatif, uji keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas data, uji dependabilitas, uji transferabilitas dan uji komfirmabilitas.

1) Uji Kredibilitas Data

Kredibilitas berarti upaya untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penemuan yang didapat. Meningkatkan kepercayaan data dilakukan oleh peneliti dengan wawancara secara mendalam untuk

memperkaya data penelitian dan sudah melakukan klarifikasi dengan bertanya kembali saat wawancara jika terdapat informasi yang tidak jelas. Hasil wawancara direkam sebagai bukti keabsahan data. Peneliti juga membuat transkrip verbatim yang didapatkan dari hasil wawancara kepada partisipan.

2) Uji Dependabilitas

Dependabilitas merupakan data penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini peneliti melakukan keabsahan data dengan melakukan analisis data terstruktur dan mengupayakan untuk melakukan interpretasi hasil penelitian dengan benar.

Peneliti melakukan analisis dimulai dengan pembuatan transkrip, mencari dan menentukan kata kunci, menentukan makna bahasa dan makna kontekstual dari kata kunci, membuat kategori, menyusun sub-sub tema, sub tema dan menentukan tema. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan hasil penelitian sesuai dengan analisa data yang telah dikonsulkan pada pembimbing sebagai pihak ahli untuk mendapatkan masukan.

3) Uji Konfirmability

Uji konfirmabilitas merupakan suatu proses untuk memperoleh objektivitas data. Pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan kembali hasil penelitian dengan membaca berulang dan melengkapi transkrip verbatim dengan hasil observasi yang didapatkan pada proses pengambilan data.

3.9. Etika Penelitian

Penelitian ini menggunakan dasar etika dimana partisipan bebas memilih apakah identitas dirinya bersedia ditampilkan atau tidak. Penelitian ini juga tidak memaksa partisipan untuk memberikan informasi pribadi yang tidak ingin atau tidak boleh diberikan. Prinsip-prinsip etika yang perlu diperhatikan diantaranya:

- 1) Sebelum memulai penelitian, peneliti meminta izin secara langsung kepada Partisipan yang telah terpilih. Kemudian segala persetujuan keberatannya dicatat dan disetujui secara bersama
- 2) *Informed consent*: merupakan persetujuan antara peneliti dengan partisipan, dengan memberikan lembar persetujuan (*informed consent*). *Informed consent* diberikan sebelum penelitian dilaksanakan. Tujuan *informed consent* adalah agar partisipan mengerti maksud dan tujuan penelitian, mengetahui dampaknya, jika partisipan bersedia maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan, serta bersedia untuk direkam dan jika partisipan tidak bersedia maka peneliti harus menghormati hak partisipan.
- 3) *Anonimity* : merupakan etika dalam penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama partisipan pada pengumpulan data atau hasil penelitian yang disajikan.
- 4) *Confidentialy* : merupakan etika penelitian untuk menjamin kerahasiaan dari hasil penelitian baik informasi maupun masalah-masalah lainnya, semua partisipan yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang dilaporkan pada hasil penelitian.

5) *Justice* : dalam penelitian ini peneliti menjamin hak partisipan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan diperlakukan dengan baik, dengan begitu peneliti juga berkewajiban untuk tidak mendiskriminasi partisipan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan bagi penelitian yang dilakukannya.



BAB IV ANALISIS SETTING SOSIAL

4.1 Geografis Kabupaten Sikka

Kabupaten Sikka dengan Maumere sebagai ibu kotanya adalah salah satu wilayah kabupaten dari 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kabupaten Sikka secara geografis berbatasan langsung dengan laut Flores disebelah utara dan laut Sawu di selatannya. Sedangkan bagian barat berbatasan dengan kabupaten Ende dan Kabupaten Flores Timur di sebelah timurnya. Luas wilayah kabupaten Sikka adalah 1.731,91 km² dengan jumlah penduduk 363.374 jiwa.

Penduduk kabupaten Sikka tersebar pada 21 kecamatan dan terbagi dalam 147 Desa dan 13 Kelurahan. Adapun ke 13 kelurahan tersebut tersebar di 3 kecamatan yang ada dalam wilayah perkotaan yakni terletak pada kecamatan Alok, Alok Barat dan Alok Timur. Kawasan berpenduduk padat adalah di kawasan utara yang berbatasan dengan Laut Flores, sedang kawasan selatan yang berbatasan dengan Laut Sawu/Lautan Hindia berpenduduk jarang. Konsentrasi penduduk perkotaan ada di Kota Maumere (Kecamatan Alok/Alok Timur/Alok Barat) dan kawasan Geliting di Kecamatan Kewapante. Data jumlah penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018 dan 2019

No.	Kecamatan	Tahun 2018			Tahun 2019		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Paga	8.714	9.407	18.121	9.026	9.728	18.754
2	Mego	7.143	7.455	14.598	7.339	7.641	14.980
3	Tanawawo	5.294	5.421	10.715	5.442	5.577	11.019
4	Lela	6.069	6.642	12.711	6.153	6.707	12.860
5	Bola	5.653	6.552	12.205	5.733	6.620	12.353
6	Doreng	6.614	6.908	13.522	6.663	6.954	13.617
7	Mapitara	3.890	4.098	7.988	3.966	4.114	8.080
8	Talibura	12.643	13.101	25.744	12.836	13.264	26.100
9	Waigete	13.630	14.128	27.758	13.855	14.367	28.222
10	Waiblama	4.526	4.574	9.100	4.606	4.647	9.253
11	Kewapante	7.642	8.641	16.283	7.784	8.751	16.535
12	Hewokloang	5.211	5.719	10.930	5.261	5.795	11.056
13	Kangae	9.234	10.300	19.534	9.405	10.483	19.888
14	Palue	5.673	6.496	12.169	5.821	6.613	12.434
15	Koting	3.383	3.758	7.141	3.408	3.767	7.175
16	Nelle	3.183	3.531	6.714	3.195	3.534	6.729
17	Nita	11.840	12.190	24.030	12.001	12.361	24.362
18	Magepanda	7.174	7.390	14.564	7.313	7.504	14.817
19	Alok	17.301	17.341	34.642	17.425	17.572	34.997
20	Alok Barat	11.986	12.002	23.988	12.219	12.193	24.412
21	Alok Timur	17.297	18.164	35.461	17.415	18.316	35.731
	Total	174.100	183.818	357.918	176.866	186.508	363.374

Sumber : Dispenduk Capil Kabupaten Sikka, 2019

Dari tabel tersebut, tampak bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Namun dalam kenyataannya masih sangat minim perempuan yang inukt berpartisipasi dalam ruang-ruang publik terutama dalam politik.

4.2 Gambaran Umum Politik di Kabupaten Sikka

Kehidupan politik di Kabupaten Sikka cukup berkembang dengan hadirnya partai-partai politik. Pada Pemilu 2019 ada 16 partai politik yang ikut berlaga dalam pentas demokrasi lima tahunan ini. Jumlah partai mengalami penambahan apabila dibandingkan dengan jumlah partai kontestan pada Pemilu 2014 sebelumnya yang hanya diikuti oleh 12 partai politik.

Pembagian wilayah dalam pendekatan pemilu legislatif untuk mengakomodir keterwakilan keanggotaan legislatif dari setiap wilayah pada 21 kecamatan yang ada, maka daerah pemilihan anggota DPRD dibagi menjadi 4 dapil (Daerah Pemilihan) yaitu : Dapil Sikka I meliputi Kecamatan (Alok, Alok Timur, Alok Barat dan Palu'e), Dapil Sikka II meliputi Kecamatan (Lela, koting, Nelle, Kangae, Kewapante dan Hewokloang), Dapil Sikka III meliputi Kecamatan (Paga, Tanawawo, Mego, Nita dan Magepanda) serta Dapil Sikka IV meliputi Kecamatan (Bola, Doreng, Mapitara, Waigete, Talibura dan Waiblama). Jumlah pemilih tetap pada Pemilu tahun 2014 dan 2019 pada masing-masing Dapil masih didominasi oleh pemilih perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Jumlah Pemilih Tetap Perdapil Tahun 2018 dan 2019

No	Nama Daerah Pemilihan (DAPIL)	Jumlah Pemilih			
		Tahun 2014		Tahun 2019	
		Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki	Perempuan
1	DAPIL SIKKA I	19.401	24.476	26.633	30.372
2	DAPIL SIKKA II	24.459	29.153	19.870	24.159
3	DAPIL SIKKA III	24.042	26.550	23.535	28.056
4	DAPIL SIKKA IV	23.108	27.876	20.971	24.227
	TOTAL	91.010	108.055	91.009	106.814

Sumber : KPUD Kabupaten Sikka, 2019

4.3 Sejarah Politisi Perempuan pada Lembaga Legislatif di Kabupaten Sikka

Kiprah atau partisipasi politik perempuan di Kabupaten Sikka berawal dari periode keanggotaan DPRD Tahun 1961-1966. Ketika itu terdapat 18 anggota DPRD di Parlemen dan salah satu diantaranya adalah perempuan. Meskipun jumlah keterwakilannya sangat minim namun eksistensi politisi perempuan dalam lembaga legislatif selalu berkesinambungan dari periode ke periode sejak periode 1961-1966 sampai periode 2014-2019. Kecuali pada periode 1971-1977 dan periode awal yaitu pada tahun 1959-1961 tidak ada keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dari 20 anggota DPRD kabupaten Sikka pada periode tersebut.

Hal ini semakin memperkuat bahwa ranah politik hanya menjadi ajang untuk kaum pria sementara perempuan hanya sebagai pendukung. Minimnya prosentase perolehan kursi di legislatif dari periode ke periode tidak melampaui kisaran 10%.

Sementara pemerintah sudah berupaya dengan memberikan *affirmative action*

sekaligus kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan dengan mematok kuota 30% bagi perempuan.

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Sikka dari periode ke periode dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 4.3. Anggota Legislatif dari Periode ke Periode
Tahun 1959 - 2019**

No	PERIODE	ANGGOTA LEGISLATIF			PROSENTASE	
		L	P	Jumlah	L	P
1	1959 - 1961	17	-	17	100	-
2	1961 - 1966	17	1	18	94	6
3	1966 - 1971	17	1	18	94	6
4	1971 - 1977	20	-	20	100	-
5	1977 - 1982	20	1	21	95	5
6	1982 - 1987	21	2	23	91	9
7	1987 - 1992	21	2	23	91	9
8	1992 - 1997	23	2	25	92	8
9	1997 - 1999	23	2	25	92	8
10	1999 - 2004	28	2	30	93	7
11	2004 - 2009	26	4	30	87	13
12	2009 - 2014	26	4	30	87	13
13	2014 - 2019	32	3	35	91	9

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka, 2019

Sementara itu untuk data calon legislatif pada pemilu tahun 2014 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4. Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Tahun 2014

No	PARTAI	ANGGOTA LEGISLATIF		PROSENTASE	
		L	P	L	P
1	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	23	12	65,7	34,3
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	23	12	65,7	34,3
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	20	12	62,5	37,5
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	23	12	65,7	34,3
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	23	12	65,7	34,3
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	23	12	65,7	34,3
7	Partai Demokrat	23	12	65,7	34,3
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	23	12	65,7	34,3
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9	5	64,3	35,7
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	23	12	65,7	34,3
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	16	9	64	36
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	23	12	65,7	34,3

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka, 2019

Tabel 4.5. Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Tahun 2019

No	PARTAI	ANGGOTA LEGISLATIF		PROSENTASE	
		L	P	L	P
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	23	12	65,7	34,3
2	Parti Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	21	12	63,6	36,4
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	23	12	65,7	34,3
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	22	13	62,9	37,1
5	Partai NasDem	22	13	62,9	37,1
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	11	9	55,0	45,0
7	Partai Beringin Karya (BERKARYA)	9	6	60,0	40,0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9	7	56,3	43,75
9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	21	11	63,6	33,3
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	8	4	66,7	33,3
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	22	12	64,7	35,3
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	23	12	65,7	34,3
13	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	23	12	65,7	34,3
14	Partai Demokrat	23	12	65,7	34,3
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	5	3	62,5	37,5
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	22	12	64,7	35,3

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka, 2019

Tabel 4.6. Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Tahun 2014

No	PARTAI	ANGGOTA LEGISLATIF		PROSENTASE	
		L	P	L	P
1	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	23	12	65,7	34,3
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	23	12	65,7	34,3
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	20	12	62,5	37,5
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	23	12	65,7	34,3
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	23	12	65,7	34,3
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	23	12	65,7	34,3
7	Partai Demokrat	23	12	65,7	34,3
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	23	12	65,7	34,3
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9	5	64,3	35,7
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	23	12	65,7	34,3
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	16	9	64	36
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	23	12	65,7	34,3

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka, 2019

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang makna peran politisi perempuan bagi calon legislatif perempuan dalam kontestasi politik di Sikka. Pada bagian ini juga akan diuraikan tentang tema-tema yang dihasilkan setelah dilakukan penggalian data dan analisisnya serta pembahasan hasil analisisnya.

5.2 Hasil Penelitian

Setelah dilakukan wawancara yang mendalam dan analisis data maka diperoleh beberapa tema yang telah menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Berikut tema-tema yang diperoleh dari hasil analisis adalah sebagai berikut :

5.2.1 Pemahaman calon legislatif perempuan terhadap peran politisi perempuan

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dualisme dalam pemahaman tentang peran politisi perempuan, pada aspek yang pertama para calon legislatif memahami peran politisi perempuan sebagai pejuang agenda gender dan terdapat pula partisipan yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara politisi perempuan dan laki-laki dalam konteks tugas dan peran sebagai seorang politisi.

Pada aspek yang pertama terdapat dua tema, yaitu peran untuk memperjuangkan agenda gender (5.2.1.1) dan tema yang kedua adalah menyusun regulasi yang responsif gender (5.2.1.2). Sedangkan pada aspek yang kedua, menunjukkan tidak ada perbedaan peran antara politisi laki-laki dan perempuan. Hal ini ditunjukkan pada tema memperjuangkan aspirasi politik masyarakat (5.2.1.3.)

Tema-tema itu secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut :

5.2.1.1 Memperjuangkan Agenda Gender

Partisipan memahami bahwa menjalankan peran sebagai seorang politisi perempuan adalah untuk memperjuangkan agenda gender dengan menyusun program/kegiatan serta anggaran bagi perempuan dan anak serta menyalurkan aspirasi perempuan.

5.2.1.1.1 Menyusun program/ kegiatan untuk perempuan dan anak

Partisipan memahami bahwa dalam perannya sebagai politisi perempuan, harus paham cara memberdayakan masyarakat terutama perempuan serta anak yakni dengan menyusun program/ kegiatan serta anggaran yang dapat meningkatkan pemberdayaan bagi seluruh masyarakat dan yang terpenting adalah pemberdayaan bagi perempuan dan anak. Pemahaman tentang hal ini secara kontekstual dapat dilihat dari petikan jawaban partisipan berikut ini :

“bagi saya pribadi ya...kalau mau terjun ke politik maka harus paham tentang pemberdayaan masyarakat..dan yang terpenting lagi bagaimana bisa memperjuangkan perempuan untuk lebih berdaya dan tentu saja termasuk dengan anak” (MLD)

pernyataan yang sama disampaikan oleh partisipan lainnya sebagai berikut :

“saya melihat anggota DPRD Perempuan yang saat ini lagi duduk, kurang memperhatikan pemberdayaan perempuan dan anak. Harusnya kegiatan pemberdayaan perempuan itu yang diutamakan termasuk untuk anak” (HDN)

Selanjutnya partisipan lainnya berpendapat yang sama dengan pernyataannya :

“...Program dan kegiatan itu harus disusun dan diperjuangkan untuk pemberdayaan perempuan dan anak, ya tentu saja tanpa melupakan laki-laki ya.. itu yang saya mau jika saya terpilih nanti” (TAD)

Dari data-data diatas dapat dilihat bahwa pemahaman partisipan terhadap peran politiknya adalah mengutamakan pemberdayaan perempuan dan anak yang yang dituangkan dalam program/kegiatan dan anggaran.

5.2.1.1.2 Menyalurkan aspirasi perempuan

Selain peran untuk memperjuangkan program/kegiatan serta menentukan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, partisipan juga memahami bahwa peran politisi perempuan untuk menyalurkan aspirasi perempuan. Secara harafiah aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat berupa harapan perubahan ke arah yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan.

Menurut partisipan dengan menjadi politisi, perempuan dapat menyuarakan kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu melalui program dan kegiatan serta anggaran yang terencana diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan perempuan untuk menjawab kebutuhan perempuan dan anak menuju suatu perubahan yang lebih baik. Secara kontekstual pemahaman tentang hal ini dapat dilihat dari petikan jawaban partisipan berikut ini :

"... menjadi anggota legislatif karena saya mau memperjuangkan aspirasi perempuan dan orang muda/anak" (YKP)

Dan selanjutnya dalam kutipan pernyataan partisipan berikutnya :

"Sudah sepantasnya perempuan itu berpolitik karena apa yang kita butuhkan itu yang bisa menyuarakan hanya perempuan sendiri" (TAD)

Menyalurkan aspirasi perempuan juga dapat dilakukan dengan menyusun agenda pembangunan gender yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Hal ini sesuai dengan dengan jawaban dari partisipan berikut ini :

"saya merasa penting sekali perempuan ada di dalam dunia politik karena perempuan ini bagian dari pembangunan, Dia harus memperjuangkan banyak hal yang dia alami, dia rasakan yang belum bisa di atasi oleh orang lain, jadi harus perempuan sendiri yang mengetahui kelemahannya, kesulitan yang di alami dan dia harus berjuang untuk perempuan" (RMP)

Partisipan ini juga berpendapat bahwa agar dapat menjadi seorang aspirator maka bergabung menjadi anggota salah satu partai adalah merupakan suatu syarat mutlak guna mendapatkan kekuasaan agar dapat memperjuangkan kepentingan perempuan. Hal ini secara kontekstual dapat dilihat dari petikan jawabannya sebagai berikut :

"saya berpikir bahwa untuk mengatasi persoalan perempuan ini butuh kekuasaan, kita tidak bisa hanya berjuang dengan modal keberanian, tidak bisa. Harus ada kekuasaan di situ, untuk itu saya berani untuk terjun ke dunia politik karena ini kendaraan untuk saya bisa berjuang" (RMP)

Dari data-data diatas menunjukkan bahwa para partisipan memang memiliki pemahaman terhadap perjuangan agenda gender yakni dengan menyalurkan aspirasi perempuan yang tertuang dalam program/kegiatan serta anggaran bagi pemberdayaan perempuan dan anak.

5.2.1.2 Menyusun Regulasi Yang Responsif Gender

Pemahaman Partisipan terhadap peran politisi perempuan salah satunya adalah menjadi regulator atau penyusun kebijakan baik untuk perempuan dan anak secara khusus maupun menyusun kebijakan yang sensitif gender. Oleh Karena itu perbedaan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi baik laki-laki maupun perempuan harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan agar responsif gender.

5.2.1.2.1 Kebijakan untuk perempuan dan anak

Perumusan kebijakan untuk perempuan dan anak dibangun dari isu atau agenda-agenda gender yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak. Isu-isu gender dalam bidang pendidikan dan kesehatan masih menempati urutan pertama dalam agenda gender. Oleh karena itu menurut Partisipan harus ada aturan yang bisa menjawab isu pendidikan dan kesehatan bagi kepentingan perempuan dan anak.

Secara kontekstual dapat dilihat dari petikan jawabannya berikut ini :

"Menyusun regulasi yang mengatur tentang guru PAUD dan guru TK Non Formal (MLD)"

Dan dilanjutkan oleh partisipan lainnya :

"Harus ada aturan yang jelas tentang pelayanan kesehatan, pendidikan yang merata bagi perempuan dan anak yang biasanya terlupakan" (MAO)

Dengan data yang ada dapat dilihat bahwa pemahaman partisipan terhadap peran politiknya adalah menjadi regulator untuk menyusun kebijakan bagi perempuan dan anak yang mengakomodasi agenda gender tentang isu-isu perempuan dan anak.

5.2.1.2.2 Kebijakan yang sensitif gender

Untuk menyusun kebijakan yang sensitif gender maka sangat dibutuhkan suatu penyesuaian aspirasi perempuan yang mendukung kesetaraan gender dan menghindari diskriminasi atas gender tertentu. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut :

“Nah, itu nona.. dalam komitmen perjuangan itu ada satu hal yaitu, kalau bisa ketika Mama sudah duduk, ada Peraturan Daerah tentang Gender Kalau ada Perda berarti ada payung hukumnya. Sehingga program dari Dinas/Instansi yang menyangkut Gender itu bisa hidup” (HDN)

Dan dilanjutkan oleh Partisipan berikutnya dalam kutipan :

“Sebenarnya membuat peraturan itu ide saya, kalau ada aturan itu enak, Jadi aspirasi itu mau di bawa untuk menjadi sebuah regulasi” (P5).

Artinya dari data diatas menunjukkan ada beberapa partisipan yang memiliki pemahaman bahwa peran mereka sebagai politisi perempuan adalah sebagai regulator atau penyusun kebijakan yang responsif gender.

5.2.1.3 Memperjuangkan aspirasi politik masyarakat

Selain dua tema yang telah disampaikan diatas, ada pemahaman lain dari Partisipan terhadap peran politiknya adalah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini dapat diperjuangkannya melalui program dan kegiatan serta anggaran dan tersebar pada semua lokasi untuk seluruh masyarakat dan lebih terfokus pada pelayanan-pelayanan dasar. Berikut secara kontekstual dapat dilihat dalam kutipan dibawah ini :

“...menjadi saya punya perjuangan umum layanan dasar itu, secara umum saya berjuang, lewat teknokrat, lewat renja-renja saya berjuang untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pendekatan saya yang pertama lebih pada hak dasar yang menyentuh dan langsung ke rumah-rumah” (MYS)

Hal yang sama disampaikan oleh Partisipan lainnya dalam kutipan sebagai berikut :

"Kita kan tahu bahwa DPRD ini sebagai penyalur aspirasi rakyat, Tupoksi utamanya kan membawa aspirasi, apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kalau saya duduk di DPRD maka banyak hal yang memang saya harus perjuangkan untuk kemajuan masyarakat ini" (HDN)

selanjutnya Partisipan lainnya memberikan pemahamannya sebagai berikut :

"....ketika saya berada dalam sistem saya betul-betul merasakan, bagaimana hasil perjuangan agar dapat berbuat sesuatu untuk rakyat, seperti jalan dan infrastruktur lainnya. Saya merasakan bahwa berada dalam sitem itu luar biasa, karena kita mampu mengendalikan sistemnya yang penting itu setinggi-tingginya untuk kepentingan masyarakat" (YKP)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa partisipan yang memiliki pemahaman bahwa peran mereka sebagai politisi perempuan adalah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara umum menyangkut pelayanan dasar masyarakat.

Tema-tema yang sudah disampaikan diatas menjawab pertanyaan penelitian yang pertama tentang pemahaman calon legislator perempuan terhadap peran politisi perempuan. Dari ulasan tema-tema diatas diketahui bahwa pemahaman terhadap peran politisi perempuan dari masing-masing partisipan berbeda. Ada partisipan yang memahami bahwa peran politisi perempuan yang paling utama adalah memperjuangkan agenda gender dengan program dan kegiatan serta anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak, mampu menyalurkan aspirasi perempuan guna pemenuhan kebutuhan dan kepentingan perempuan dan anak yang teragenda dalam agenda pembangunan perempuan. Untuk menyalurkan aspirasi perempuan sangat dibutuhkan kekuasaan dan untuk itu perempuan

membutuhkan kendaraan politik dengan bergabung menjadi anggota dalam partai politik yang ada.

Selain itu para partisipan juga memaknai peran politisi perempuan sebagai regulator dalam menyusun regulasi yang responsif gender. Isu-isu atau agenda gender perlu disusun dalam suatu regulasi kebijakan untuk perempuan dan anak.

Meskipun proses politik yang sementara dijalani oleh para partisipan sebagai calon legislator belum sampai pada tataran tindakan untuk menjadi regulator, tapi partisipan sudah memproyeksikan dirinya menjadi seorang regulator sehingga pemaknaannya dapat digali.

Partisipan juga memahami bahwa untuk menjadi seorang politisi perempuan, mereka menyadari bahwa tidak cukup hanya memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak, tetapi juga harus memperjuangkan aspirasi masyarakat secara umum dalam pemenuhan akan hak-hak dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.

5.2.2 Motivasi menjadi calon legislatif dalam kontestasi politik

Ditemukan dalam penelitian ini bahwa setiap partisipan memiliki dorongan atau motivasi yang berbeda untuk berpartisipasi menjadi seorang calon legislatif dalam kontestasi politik. Ada partisipan yang menyadari bahwa motivasi yang dimiliki untuk maju dalam kontestasi politik karena memiliki suatu dorongan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan secara khusus. Sedangkan di sisi lain ada partisipan yang memiliki motivasi yang berbeda yakni tidak semata-mata karena ingin memperjuangkan kepentingan perempuan tetapi lebih pada motivasi secara

personal dan profesional sesuai dengan pengalaman dibidang mereka masing-masing.

Hal ini dapat dilihat pada dua tema yang akan dipaparkan berikut yaitu tema memiliki motivasi untuk memperjuangkan ideologis gender (5.2.2.1) dan memiliki motivasi yang non ideologis gender (5.2.2.2). Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

5.2.2.1 Memiliki motivasi memperjuangkan ideologi gender

Pada tema ini Partisipan merasa terpanggil untuk memperjuangkan sistem serta nilai yang didasarkan pada determinisme biologis yang menghasilkan seksisme dan diskriminasi terutama terhadap perempuan. Partisipan memiliki motivasi yang kuat untuk mengatasi segala ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat yang dialami oleh perempuan dengan memperjuangkan program dan kegiatan yang sensitif gender dan program pemberdayaan perempuan yang responsif gender.

5.2.2.1.1 Program yang sensitif gender

Partisipan merasa terpanggil untuk ikut dalam kontestasi politik, karena dia merasa bahwa ketika berhasil dipilih menjadi anggota legislator, maka akan mempunyai banyak kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan bagi perempuan dan anak yang dianggap oleh sebagian orang adalah merupakan masalah-masalah yg sepele. Menurut para partisipan program pembangunan yang

diusung seharusnya menghindari diskriminasi atas gender tertentu. Secara kontekstual dapat dilihat dari jawaban partisipan berikut :

"Saya banyak bergaul dengan kaum perempuan, saya terpenggil, merasa bahwa seandainya saya duduk disana mungkin banyak hal yang bisa saya perbuat terutama untuk kaum ibu dan anak-anak".(TAD)

Pernyataan yang sama disampaikan oleh partisipan lainnya karena memiliki dorongan untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi dapat dilihat dalam kutipan jawaban berikut :

"Merasa terpenggil ingin sekali bisa mengatasi segala ketimpangan yang terjadi, banyak persoalan yang terjad di dalam masyarakat ini yang bisa di akomodir. Terlebih persoalan yang menyangkut perempuan dan laki-laki secara keseluruhan. Selama ini sulit, orang menganggap bahwa masalah perempuan itu masalah yang tidak terlalu penting" (RMP)

"Saya melihat tuh justru perempuan ini harus lebih diperhatikan tapi banyak yang disepeleahkan" (MLD)

Dari data diatas, dapat menunjukkan bahwa motivasi Partisipan untuk menjadi seorang politisi perempuan adalah karena memiliki dorongan untuk memperjuangkan program dan kegiatan serta anggaran dengan lokasi yang sesuai untuk pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak dalam program-program yang sensitif gender guna memperkecil ketimpangan yang ada dalam masyarakat.

5.2.2.1.2 Program pemberdayaan perempuan

Selain memiliki motivasi memperjuangkan program yang sensitif gender seperti yang telah diuraikan diatas, Partisipan juga memiliki motivasi lainnya dalam hal memperjuangkan ideologis gender. Partisipan sejak awal merasa tertarik dan berminat untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik juga dikarenakan telah

tergabung dalam Tim Penggerak PKK Kabupaten Sikka yang semua programnya adalah untuk pemberdayaan perempuan.

Selanjutnya Partisipan yang lainnya memiliki dorongan untuk terjun dalam politik dan menjadi politisi perempuan untuk memperjuangkan ideologis gender karena mereka menemukan banyak masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak yang membutuhkan perhatian. Secara kontekstual dapat dilihat dari kutipan jawaban Partisipan berikut ini :

"..Motivasi awal saya ya.. karena semua program yang ada dalam PKK itu adalah program pemberdayaan Perempuan (MLD).

Dan dilanjutkan oleh Partisipan yang lainnya dengan kutipan pernyataan :

" ya..banyak masalah yang dihadapi oleh perempuan dan juga anak, tetapi belum diperhatikan dengan baik. Penanganannya belum tepat. Sejauh mana kita seharusnya memperhatikan mereka ya dengan upaya-upaya program pemberdayaan terhadap mereka". (MAO) .

Dari kutipan beberapa pernyataan Partisipan diatas menunjukkan bahwa memiliki motivasi untuk memperjuangkan ideologis gender merupakan salah satu hal yang mendorong Partisipan untuk berpartisipasi menjadi seorang politisi perempuan.

5.2.2.2 Memiliki motivasi yang non ideologis gender

Dari hasil penelitian ditemukan ada motivasi lain yang dimiliki oleh Partisipan sebagai politisi perempuan dalam berpartisipasi sebagai calon legislator pada kontestasi ini, adalah motivasi personal dan motivasi profesional. Kedua motivasi ini terangkum dalam tema tidak memiliki motivasi yang ideologis gender.

5.2.2.2.1 Motivasi profesional

Partisipan memiliki motivasi ini karena pengalaman dalam pekerjaan mereka seperti menjadi Aparatur Sipil Negara ataupun pernah bergabung pada organisasi-organisasi yang bekerja pada isu perempuan. Pengalaman dari organisasi yang pernah diikuti inilah yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik sebagai seorang calon legislator. Hal ini dapat dijelaskan dengan kutipan para

Partisipan di bawah ini :

“Pengalaman bekerja sebagai PNS selama 30 tahun di bidang yang berhubungan dengan perempuan dan anak, hal ini yang memotivasi saya untuk terjun ke dalam dunia politik” (HDN)

“sebelumnya juga saya bekerja pada isu perempuan, di Kelurahan Kabor, dan saya bersyukur bahwa telah bergabung pada Divisi Perempuan pada TRUK F (Tim Relawan Untuk Kemanusiaan-Flores)” (RMP)

“bahwa setelah menjadi ketua/pemimpin TP PKK Kecamatan Alok Timur, saya banyak bergaul dengan kaum perempuan, dan memang di PKK itu kan ngrurusin tentang perempuan. Jadi saya terpanggil, merasa bahwa seandainya saya duduk disana mungkin banyak hal yang bisa saya perbuat terutama untuk kaum ibu dan anak-anak” (TAD)

Artinya dari data diatas menunjukkan bahwa ada beberapa partisipan yang memiliki motivasi untuk menjadi politisi perempuan karena dorongan secara profesional yang mereka dapatkan dari pengalamannya dalam berorganisasi.

5.2.2.2.2 Motivasi personal

Peluang yang diperoleh karena jabatan atau posisi suami dalam politik, mendapat dorongan suami serta dukungan dari orang tua dan keluarga menjadi salah satu motivasi bagi politisi perempuan untuk terjun dalam dunia politik. Ketika suami mendapat jabatan politik dalam partai, partisipan merasa mendapatkan peluang karena ada kuota 30% untuk perempuan yang menjadi salah satu syarat

partai untuk menjadi peserta Pemilu. Peluang ini yang memotivasi partisipan untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik. Hal tersebut secara kontekstual dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut :

“Berawal dari ketika Bapa sudah menjadi ketua Partai MELATI, kemudian saya diajak untuk bergabung dalam Partai MELATI” (HDN)

“Suami merasa bahwa sebagai seorang ibu RT saya mampu berada di ranah politik. Maka beliau mendorong saya untuk bergabung didalam salah satu partai” (TAD)

Partisipan juga mendapat dukungan yang berasal dari keluarga dan orang tuanya dilihat dari kutipan pernyataan berikut :

“...jadi ya bagi saya ada beberapa hal yang sangat memotivasi saya dalam berpolitik yaitu ketokohan ayah saya, dukungan financial yang cukup dan elektabilitas saya pribadi sebagai seorang seniman” (YKP)

Disamping pernyataan diatas, salah satu partisipan berpendapat bahwa motivasi pribadinya adalah untuk memperjuangkan keadilan masyarakat secara umum *“saya merasa terpanggil untuk mengatasi segala ketimpangan yang ada dalam masyarakat kita, saya ingin memperjuangkan keadilan” (RMP)*

Dari data diatas menunjukkan bahwa ada beberapa partisipan yang tidak memiliki motivasi ideologis gender, motivasi para politisi perempuan ini diperoleh karena peluang dari jabatan suami juga mendapat dorongan suami yang juga seorang pejabat disamping adanya motivasi pribadi untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat umum.

Tema-tema yang sudah diuraikan diatas menjawab pertanyaan penelitian terkait motivasi calon legislatif perempuan sebagai politisi perempuan dalam kontestasi politik. Dapat dilihat dari uraian dimaksud bahwa ada perbedaan motivasi diantara partisipan sebagai politisi perempuan. Ada partisipan yang memiliki

motivasi untuk memperjuangkan ideologis gender. Partisipan merasa terpanggil untuk mengatasi ketimpangan dan persoalan yang terjadi dalam masyarakat terlebih masalah perempuan dan anak. Partisipan berkeinginan untuk memperjuangkan program/kegiatan, anggaran yang tepat untuk pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak. Partisipan merasa bahwa ketika mendapat kesempatan untuk menjadi anggota legislatif maka akan ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk kaum ibu dan anak. Partisipan memiliki motivasi untuk memperjuangkan program-program yang sensitif gender yakni program dan kegiatan yang menghindari diskriminasi atas gender tertentu.

Selanjutnya sesuai hasil temuan penelitian, ada partisipan yang tidak secara khusus memiliki motivasi untuk memperjuangkan ideologis gender ketika berpartisipasi menjadi politisi perempuan. Hal yang memotivasi mereka karena alasan profesional yakni pengalaman dalam berorganisasi, baik pengalaman dalam organisasi yang bergerak pada isu perempuan dan anak maupun pengalaman dalam tugas pokok dan fungsi mereka dalam suatu organisasi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak. Peluang yang diperoleh karena jabatan atau posisi suami dalam politik, serta mendapat dorongan suami juga dukungan dari orang tua dan keluarga menjadi salah satu motivasi pribadi bagi para politisi perempuan untuk terjun dalam dunia politik.

5.2.3 Pengalaman Calon legislatif perempuan berpartisipasi dalam kontestasi politik

Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman pada saat kampanye atau ketika para politisi perempuan mensosialisasikan diri. Para partisipan masing-masing mempunyai pengalaman yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada dua hal yang ditemukan dalam pengalaman partisipan selama masa kampanye yaitu yang pertama tentang materi kampanye dan yang kedua hambatan-hambatan yang ditemukan pada saat kampanye.

Pada materi kampanye ditemukan dua tema yaitu menyampaikan isu tentang gender (5.2.3.1) dan tema kedua tidak mengkampanyekan isu-isu gender (5.2.3.2) melainkan hal-hal lain untuk kepentingan masyarakat secara umum seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar lainnya. Sementara ada Partisipan yang mengalami hambatan dalam mengkampanyekan dirinya karena kurang percaya diri ketika tampil untuk mensosialisasikan diri pada tema (5.2.3.3) Hal ini diakibatkan karena rasa ketergantungan terhadap kehadiran suami dan juga karena tidak mendapatkan dukungan dari sesama perempuan.

5.2.3.1 Menyampaikan isu tentang gender

Partisipan selama menjalani masa kampanyenya lebih fokus untuk menyampaikan isu-isu tentang kesetaraan gender sebagai materi utama dalam mensosialisasikan diri. Partisipan menginginkan agar perempuan dan juga anak lebih diperhatikan. Secara kontekstual hal ini dapat dilihat dalam petikan jawaban partisipan berikut ini :

“Ketika sosialisasi atau kampanye dan audiensnya lebih banyak laki-laki. saya merasa tertantang, saya suka. justru saat kita omong tentang perempuan itu harus laki-laki yang dengar” (MLD)

Dan dilanjutkan oleh partisipan berikutnya :

“Saya sampekan kepada masyarakat, saya datang hanya membawa hati dengan apa yang saya miliki. saya ingin kita perempuan ini lebih maju dan lebih baik untuk kita punya diri dan anak-anak kita. saya akan lebih fokus kepada Perempuan dan anak-anak” (TAD)

Hal ini menandakan bahwa dalam mensosialisasikan diri selama masa kampanye, partisipan mengusung materi tentang kepentingan perempuan dan anak.

5.2.3.2 Tidak menyampaikan isu tentang gender

Sementara partisipan lainnya menempatkan isu gender bukan menjadi materi yang utama dalam berkampanye. Partisipan beranggapan bahwa menyampaikan program dan kegiatan tentang pemenuhan pelayanan dasar masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan itu yang lebih utama. Hal ini terkonfirmasi dari petikan jawaban dari partisipan sebagai berikut :

“kalau politisi baru dia akan ngomongnya mau membangun jalan, air, listrik. Begini kakak, kalau kita sudah pernah didalam, kita akan tau sendiri bahwa sistemnya akan bekerja sendiri. Karena itu adalah program pemerintah. Sekarang menurut saya, kalau kau masuk kesana apa inovasimu menjadi anggota DPRD untuk masyarakat” (YKP)

Selanjutnya disampaikan oleh partisipan berikut sebagai berikut :

Nah pada saat sosialisasi itu kan kami turun dari wilayah dusun..desa dan kecamatan. dari situ baru masyarakat menyampaikan bahwa kebutuhan hidup mereka yang sangat sulit itu adalah masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi juga perlindungan sosial. Itu yang ternyata kami keliling dua kecamatan ini, keluhan atau apa yang dirasakan masyarakat itu sama saja sehingga akhirnya kami jadikan sebagai materi kampanye kami” (HDN)

5.2.3.3 Rendahnya kepercayaan diri

Ada partisipan yang mengalami hambatan ketika sedang mengkampanyekan dirinya. Hal ini diakibatkan oleh ketidak hadiran suami saat sedang

mensosialisasikan diri dihadapan konstiuennya. Ketergantungan terhadap kehadiran suami mempengaruhi kepercayaan dirinya. Partisipan merasa kurang percaya diri apabila selama kampanye suami tidak turut mendampingi. Hal ini dapat dilihat dari petikan jawaban partisipan berikut :

“Saya ini juga termasuk seorang ibu yang ketergantungan sangat tinggi terhadap suami. Jadi ketika saya turun saya tidak bisa turun sendiri (sambil tertawa), sedangkan suami kan PNS dengan segala aturannya jelas. Tapi artinya saya tau bahwa didesa itu, di tempat dimana saya berada suami juga ada disana. begitu tuh ka ade..Jadi mungkin sudah lama saya di rumah, sehingga kemana-mana selalu bersama dia, ketergantungan saya kepada dia cukup tinggi” (TAD)

Partisipan yang lainnya juga kurang percaya diri ketika tidak mendapat dukungan dari sesama perempuan. Situasi ini menurut partisipan diakibatkan oleh adanya kecemburuan peserta sosialisasi. Secara kontekstual dapat dilihat dari jawaban partisipan sebagai berikut :

“Tantangan untuk saya tuh justru datang dari perempuan sendiri. Saya contohkan saat sukseksi ini saya justru lebih nyaman ketemu laki-laki daripada perempuan. Kita datang mau sosialisasi neh karena ada undangan dari kelompok masyarakat tapi ketika datang yang mukanya tidak betul-betul tuh ya perempuan. Laki-laki tuh nyaman-nyaman saja” (MLD)

Dari data-data diatas dapat lihat bahwa ada partisipan mempunyai pengalaman merasa kurang percaya diri selama masa kampanye karena ketergantungan terhadap kehadiran suami saat mensosialisasikan diri dan tidak mendapat dukungan dari perempuan akibat dari adanya kecemburuan para antara sesama perempuan.

Tema-tema yang sudah dipaparkan diatas menjawab pertanyaan penelitian tentang pengalaman politisi perempuan dalam kontestasi politik. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman partisipan selama mensosialisasikan diri atau pada

saat masa kampanye. Berdasarkan uraian dari tema-tema diatas diketahui bahwa masing-masing partisipan memiliki pengalaman yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Ditemukan bahwa dalam hal materi kampanye yang disampaikan terdapat perbedaan. Ada partisipan yang selama masa kampanye selalu menyampaikan isu-isu tentang gender sebagai "jualan politiknya". Partisipan tetap konsisten untuk menyampaikan tujuan utamanya terjun ke dalam kontestasi politik adalah untuk memperjuangkan kesetaraan gender dengan lebih fokus kepada kebutuhan perempuan dan juga anak.

Sementara dilain sisi ada partisipan yang tidak secara khusus menyampaikan isu-isu gender sebagai materi dalam mensosialisasikan diri. Partisipan menyampaikan program-program yang menyentuh masyarakat secara umum yakni pemenuhan akan hak-hak dasar masyarakat, karena menurut mereka ketika hak-hak dasar sudah terpenuhi maka dengan sendirinya semua program dan kegiatan untuk kesetaraan gender akan lebih muda untuk dilaksanakan.

Selanjutnya ada partisipan yang selama masa kampanye menemui hambatan. Hambatan ini berupa rendahnya kepercayaan diri yang dimiliki oleh partisipan disebabkan karena ketergantungan terhadap kehadiran suami pada saat sedang kampanye. Partisipan tidak percaya diri ketika mengetahui bahwa suaminya tidak berada di tempat dimana dia sedang mensosialisasikan dirinya. Menurutnya hal ini terjadi karena sebagai seorang ibu rumah tangga yang selalu ditemani kemanapun, dia menjadi kurang percaya diri ketika harus dilepas sendirian saat kampanye.

Partisipan yang lain mendapatkan tantangan tersendiri yakni mendapat hambatan justru dari perempuan sendiri. adanya kecemburuan antara sesama perempuan. Ketika mendapatkan undangan untuk datang sosialisasi ke kelompok-kelompok justru politisi perempuan ini mendapat hambatan dari sesama perempuan yang menunjukkan sikap kurang bersahabat dibandingkan dengan laki-laki.

5.2.4 Perasaan saat meninggalkan rumah untuk sosialisasi diri atau kampanye

Penelitian ini menemukan bahwa ketika meninggalkan rumah untuk melakukan sosialisasi atau kampanye, para partisipan pada umumnya merasa nyaman karena mendapatkan dukungan dari keluarga yakni dari suami dan juga anak-anak. Dukungan yang diberikan berupa dukungan penuh dan juga ada partisipan yang mendapatkan dukungan dengan syarat. Lebih rinci dapat dilihat pada tema berikut :

5.2.4.1 Mendapat dukungan keluarga

Partisipan mendapat dukungan dari keluarga sehingga mereka merasa nyaman untuk meninggalkan rumah sekalipun ada partisipan yang mendapat dukungan tapi dengan syarat-syarat yang diberikan baik oleh suami ataupun anak.

5.2.4.1.1 Mendapat dukungan penuh

Mendapat dukungan penuh dari keluarga membuat partisipan merasa nyaman meninggalkan rumah, meninggalkan peran domestiknya sebagai seorang ibu rumah tangga. Apalagi selama masa kampanye suami ikut serta dalam setiap

kegiatan sosialisasi. Dukungan ini juga diperoleh karena usia anak-anak yang sudah dewasa sehingga tidak membutuhkan banyak waktu untuk mengasuh mereka.

Secara kontekstual dapat dilihat dalam kutipan pernyataan berikut :

“Karena anak-anak juga sudah besar-besar. tiga orang sudah berkeluarga. Dan sudah terbiasa meninggalkan rumah bahkan lebih banyak waktu tersita ketika masih ada di PKK. Kalau saat ini paling hanya meninggalkan rumah sebentar blusukan bersama Bapak setiap sore. Tidak rasa kasih tinggal rumah, tidak merasa bahwa ada yg tidak beres di rumah” (MLD)

Dari data diatas menunjukkan bahwa partisipan merasa nyaman ketika harus meninggalkan rumah pada saat kampanye karena mendapat dukungan yang penuh dari keluarga

5.2.4.1.2 Mendapat dukungan dengan syarat

Partisipan yang lainnya mendapatkan dukungan tapi dengan syarat.

Partisipan diharapkan harus bisa menjaga diri dengan baik saat meninggalkan rumah, tidak lupa berdoa, bekerja dengan penuh tanggungjawab karena menurut suami ketika menjadi seorang legislatif itu rawan dan banyak tantangan. Partisipan juga merasa bahwa biar bagaimanapun juga harus kembali ke peran sebagai ibu rumah tangga. Kutipan pernyataan dibawah ini dapat menggambarkan hal tersebut :

...saya omong dengan moat, moat (suami) bilang saya ini ok saja, saya tidak pernah melarang kamu untuk terjun ke mana saja, politik ka dimana saja yang penting kamu berjalan baik terus bekerja dan selalu ingat doa, supaya jangan jatuh ke mana-mana, tempat yang tidak baik, Legislatif itu rawan, jadi itu saja, harus bisa jaga diri” (RMP)

Dan dilanjutkan dengan kutipan pernyataan partisipan berikut :

“Kalau saya untuk keluarga tidak menjadi masalah karena bagaimanapun juga kita harus kembali ke kodrat kita sebagai IRT. Jadi peran saya jujur kalau macam di rumah, pagi itu sudah harus masak karena suami mengerti, tapi kadang-kadang juga saya dilema karena saya juga jadi perasaan dengan

suami kalau ada tamu, tamu datangkan saya jadi tidak enak karena harus suami yang terima, dia bilang tidak apa-apa" (MYS)

Dapat dilihat dari data diatas artinya partisipan diberikan dukungan dari keluarga tapi dukungan yang diberikan masih dengan beberapa syarat. Hal ini menandakan bahwa suami mempunyai harapan agar partisipan ketika terjun ke dunia politik harus bisa menjaga diri agar tidak jatuh kedalam hal-hal negatif.

Dari tema diatas dapat diketahui bahwa perasaan partisipan saat meninggalkan rumah untuk sosialisasi diri pada masa kampanye mendapat dukungan dari keluarga baik suami maupun anak sehingga mereka merasa nyaman. Meskipun ada juga dukungan yg diberikan keluarga dengan berbagai syarat dan harapan agar partisipan bisa menjaga diri dengan baik. Keluarga beranggapan bahwa masuk ke dunia politik idan menjadi calon legislative itu cukup rawan dan banyak tantangan disana

5.3 Pembahasan

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan hasil analisis data terkait makna peran politisi perempuan bagi calon legislatif perempuan dalam kontestasi politik.

Tema-tema diatas akan dibahas untuk menjawab tujuan penelitian berdasarkan teori dan kajian penelitian terdahulu.

5.3.1 Menjelaskan Makna Pemahaman Calon Legislatif Perempuan Terhadap Peran Politisi Perempuan

Mencermati data-data hasil wawancara mendalam dengan partisipan diperoleh gambaran tentang pemahaman dari setiap partisipan terhadap peran politisi perempuan. Partisipan mempunyai pemahaman yang sangat bervariasi. Pemahaman akan peran politisi ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman dari masing-masing partisipan. Variasi pendapat mengenai makna pemahaman peran politik tersebut berkaitan dengan tingkat pendidikan perempuan, pengalaman mereka dalam berorganisasi, rekrutmen kader serta berapa lama partisipan menjadi kader suatu partai serta konteslasi politik yang sedang terjadi.

Dengan menjadi seorang politisi perempuan, maka seorang politisi diharapkan bukan saja menjadi seorang politisi yang berjenis kelamin perempuan tetapi lebih dari itu seorang politisi perempuan diharapkan paham tentang isu-isu gender sehingga dapat memperjuangkan agenda gender yaitu dengan menyusun program serta kegiatan dan anggaran bagi perempuan serta dapat menyalurkan aspirasi perempuan untuk kepentingan kelompok perempuan dan anak. Hal-hal ini akan teragenda dalam agenda pembangunan perempuan. Politisi perempuan harus aktif dalam berpartisipasi untuk memperjuangkan agenda gender. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Soekanto (2001), bahwa peran partisipasif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya dengan memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Untuk menyalurkan aspirasi perempuan sangat dibutuhkan kekuasaan dan untuk itu perempuan membutuhkan kendaraan politik dengan bergabung menjadi anggota dalam partai politik yang ada.

Menjadi regulator atau penyusun kebijakan adalah salah satu tugas dan fungsi legislatif. Isu-isu atau agenda gender perlu disusun dalam suatu regulasi kebijakan yang responsif gender untuk kepentingan perempuan dan anak. Meskipun proses politik yang sementara dijalani oleh para partisipan sebagai calon legislator belum sampai pada tataran tindakan untuk menjadi regulator, tapi politisi perempuan sudah memproyeksikan dirinya menjadi seorang regulator. Dengan menjadi regulator politisi perempuan dapat menyusun kebijakan yang responsif gender.

Mencermati keterwakilan perempuan yang tidak mencerminkan kesetaraan gender selama berpuluh-puluh tahun menginsiprasi untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik. Keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik pembuat keputusan memiliki andil sangat penting dalam mewujudkan kebijakan yang peduli pada kepentingan perempuan. Hal ini membuktikan bahwa peran politisi perempuan dalam politik sangat dibutuhkan agar dapat menyusun kebijakan tentang isu-isu gender (Manzini, 2002).

Partisipan juga memahami bahwa untuk menjadi seorang politisi perempuan, mereka menyadari bahwa tidak cukup hanya memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak, tetapi juga harus memperjuangkan aspirasi masyarakat secara umum dalam pemenuhan akan hak-hak dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.

5.3.2 Menjelaskan Makna Motivasi Calon Legislatif Perempuan Terhadap Peran Politisi Perempuan

Ada perbedaan motivasi calon legislatif perempuan sebagai politisi perempuan dalam kontestasi politik. Ada partisipan yang memiliki motivasi untuk memperjuangkan ideologis gender. Partisipan merasa terpanggil untuk mengatasi ketimpangan dan persoalan yang terjadi dalam masyarakat terlebih masalah perempuan dan anak. Partisipan berkeinginan untuk memperjuangkan program/kegiatan, anggaran yang tepat untuk pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak. Partisipan merasa bahwa ketika mendapat kesempatan untuk menjadi anggota legislatif maka akan ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk kaum ibu dan anak. Partisipan memiliki motivasi untuk memperjuangkan program-program yang sensitif gender yakni program dan kegiatan yang menghindari diskriminasi atas gender tertentu. Maka sejalan dengan ini apa yang dikatakan oleh (Nurchayho,2016) bahwa representasi politik dalam partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam parlemen adalah untuk menempatkan demokrasi yang ramah gender (*gender democracy*) Kesadaran akan perlunya pelibatan perempuan dalam pemerintahan dan pembangunan serta perencanaan kebijakan yang peka gender harus terus ditumbuhkan dalam masyarakat.

Selanjutnya ada partisipan yang tidak secara khusus memiliki motivasi untuk memperjuangkan ideologis gender ketika berpartisipasi menjadi politisi perempuan. Hal yang memotivasi mereka karena alasan profesional yakni pengalaman dalam berorganisasi, baik pengalaman dalam organisasi yang bergerak pada isu perempuan dan anak maupun pengalaman dalam tugas pokok

dan fungsi mereka dalam suatu organisasi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak. Peluang yang diperoleh karena jabatan atau posisi suami dalam politik, serta mendapat dorongan suami juga dukungan dari orang tua dan keluarga menjadi salah satu motivasi pribadi bagi para politisi perempuan untuk terjun dalam dunia politik.

5.3.3 Menjelaskan Makna Pengalaman Calon Legislatif Perempuan Terhadap Peran Politisi Perempuan

Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman partisipan selama mensosialisasikan diri atau pada saat masa kampanye. Setiap partisipan memiliki pengalaman yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Dalam hal materi kampanye yang disampaikan terdapat perbedaan. Ada partisipan yang selama masa kampanye selalu menyampaikan isu-isu tentang gender sebagai "jualan politiknya". Partisipan tetap konsisten untuk menyampaikan tujuan utamanya terjun ke dalam kontestasi politik adalah untuk memperjuangkan kesetaraan gender dengan lebih fokus kepada kebutuhan perempuan dan juga anak.

Sementara dilain sisi ada partisipan yang tidak secara khusus menyampaikan isu-isu gender sebagai materi dalam mensosialisasikan diri. Partisipan menyampaikan program-program yang menyentuh masyarakat secara umum yakni pemenuhan akan hak-hak dasar masyarakat, karena menurut mereka ketika hak-hak dasar sudah terpenuhi maka dengan sendirinya semua program dan kegiatan untuk kesetaraan gender akan lebih mudah untuk dilaksanakan.

Selanjutnya ada partisipan yang selama masa kampanye menemui hambatan. Hambatan ini berupa rendahnya kepercayaan diri yang dimiliki oleh partisipan disebabkan karena ketergantungan terhadap kehadiran suami pada saat sedang kampanye. Partisipan tidak percaya diri ketika mengetahui bahwa suaminya tidak berada di tempat dimana dia sedang mensosialisasikan dirinya. Menurutnya hal ini terjadi karena sebagai seorang ibu rumah tangga yang selalu ditemani kemanapun, dia menjadi kurang percaya diri ketika harus dilepas sendirian saat kampanye.

Partisipan yang lain mendapatkan tantangan tersendiri yakni mendapat hambatan justru dari perempuan sendiri. Adanya kecemburuan antara sesama perempuan. Ketika mendapatkan undangan untuk datang sosialisasi ke kelompok-kelompok justru politisi perempuan ini mendapat hambatan dari sesama perempuan yang menunjukkan sikap kurang bersahabat dibandingkan dengan laki-laki.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa politisi perempuan memiliki Pemahaman, pengalaman dan motivasi yang berbeda dalam berpartisipasi pada kontestasi politik. Ditemukan adanya inkonsistensi pada pemahaman dan pengalaman politisi perempuan. Politisi perempuan memahami bahwa ketika menjadi politisi perempuan maka agenda gender yang harus diperjuangkan, tetapi ketika berada dilapangan untuk mengkampanyekan diri justru dia tidak mengukung agenda ini, melainkan yang menjadi materi kampanyenya adalah agenda tentang pemenuhan hak-hak dasar. Hal yang sama juga terjadi pada motivasi mereka yang tidak sejalan dengan pemahaman dan pengalaman mereka dilapangan.

Pemahaman, motivasi serta pengalaman saat sosialisasi diri dan perasaan yang dialami oleh politisi perempuan dapat mengubah mereka dalam cara berpikir tentang peran politisi perempuan. Polit dan Beck (2010) menjelaskan bahwa fenomena yang dialami oleh politisi perempuan ini dipengaruhi oleh empat aspek yaitu *lived space*, *lived time*, *lived relationship* dan *lived body* yang pada akhirnya menciptakan suatu pemaknaan yang baru dan berbeda dari masing-masing politisi perempuan mengenai peran mereka sebagai politisi perempuan.

5.3.4 Menjelaskan Makna Perasaan Politisi saat meninggalkan rumah untuk sosialisasi diri atau kampanye

Perasaan partisipan saat meninggalkan rumah untuk sosialisasi diri pada masa kampanye mendapat dukungan dari keluarga baik suami maupun anak sehingga mereka merasa nyaman. Meskipun ada juga dukungan yg diberikan keluarga dengan berbagai syarat dan harapan agar partisipan bisa menjaga diri dengan baik. Keluarga beranggapan bahwa masuk ke dunia politik dan menjadi calon legislatif itu cukup rawan dan banyak tantangan disana.

Peran domestik sebagai ibu rumah tangga akan melekat terus pada seorang perempuan meskipun apa yang dilakukannya didukung oleh suami dan keluarganya.

Hal ini terbukti dengan perasaan yang dialami politisi ketika meninggalkan rumah untuk berkampanye. Dia merasa harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga sebelum keluar rumah untuk kegiatannya. Begitupula dukungan bersyarat yang diberikan oleh suami. Harapan suami agar istrinya bisa menjaga diri ketika berada di ranah publik dan segala persayatan yang diajukan sebenarnya hanya mau

menunjukkan bahwa tempatnya perempuan bukan di ranah publik tapi domestik.

Pada hal menurut Hefi (2002:21) pola yang terbaik untuk menyatukan suami maupun istri adalah dengan pola *compromised* yang mendudukan kedua belah pihak dalam satu kesejajaran agar diperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan yang pada gilirannya dapat saling mendukung dalam setiap masalah karena ada komitmen dan kesepakatan yang telah dibangun bersama.

Dari uraian diatas, masing-masing partisipan memiliki pemaknaan yang berbeda baik dalam hal pemahaman, motivasi maupun pengalaman mereka dalam berpartisipasi sebagai politisi perempuan. Antara para politisi perempuan sendiri tidak mempunyai agenda yang sama tentang perjuangan gender. Ada problem diantara para politisi perempuan, karena ada yang tidak memahami tentang perjuangan agenda gender. Situasi seperti ini akan sangat sulit bagi para politisi perempuan untuk mempengaruhi para politisi laki-laki untuk bersama memperjuangkan kepentingan perempuan dan juga anak. Hal ini menurut (Alfian, 2016) tidak sejalan dengan perjuangan para feminis liberal yang berbicara tentang ketimpangan gender. Namun disisi lain tidak memberikan perhatian terhadap akar masalah yang menyebabkan ketimpangan itu terjadi. Dalam hal ini akar permasalahannya adalah pemaknaan yang berbeda dari setiap politisi perempuan tentang peran mereka ketika terjun ke dunia politik untuk menjadi wakil rakyat di parlemen.

BAB VI

PENUTUP

Bab enam ini membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan tentang pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, sedangkan saran merupakan cara mengatasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

6.1 Kesimpulan

Beberapa tema yang ditemukan dari Politisi perempuan masing-masing mempunyai pemaknaan yang berbeda dalam pemahaman, motivasi dan juga pengalaman tentang peran mereka dalam kontestasi politik. Ada politisi perempuan yang memaknai perannya sebagai seorang pejuang agenda gender dan penyalur aspirasi masyarakat tapi ada pula sebagiannya memaknai berbeda yakni untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Selanjutnya dalam berperan di ruang publik sebagai politisi perempuan, ada persaan konflik batin antara peran domestik dan aktualisasi diri di ruang publik. Ada beberapa hal yang membatasi fenomena mental para politisi perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender di ranah politik yakni antara lain, pertama, tidak semua calon legislatif sebagai politisi perempuan memahami agenda tentang gender, kedua ketika politisi perempuan sudah memahami agenda tentang gender, namun belum tentu terpilih menjadi anggota legislatif karena agenda gendernya dan yang ketiga, setelah memahami agenda tentang gender dan terpilih menjadi anggota legislatif, para politisi perempuan tidak maksimal mengelola isu gender karena masih ada kendala-kendala kultural yang berkaitan dengan patriarki dan peran domestiknya.

Oleh karena itu memperjuangkan agenda tentang isu-isu gender lebih berat dibandingkan dengan memperjuangkan isu-isu yang lainnya. Akibatnya ketika membicarakan tentang alokasi anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tupoksi pemberdayaan perempuan dan anak, alokasi anggarannya sangat sedikit, karena yang paham dan memperjuangkannya juga sedikit.

6.2 Saran

Saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

1. Perempuan harus meraih pendidikan lebih tinggi, menjadi aktivis /kader partai, mengikuti diklat, seminar, lokakarya tentang berbagai hal : politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain.
2. Pemerintah agar menelaah kembali kebijakan yang bersifat umum agar lebih akomodatif, aspiratif dan adatif gender.
3. Untuk masyarakat agar merubah pola pikir dan sikap yang lebih terbuka antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat mendobrak tembok-tembok diskriminasi
4. Bagi LSM/organisasi agar membentuk kelompok penekan (pressure group) yang peduli perempuan terhadap diskriminasi dan ketidakadilan gender juga perluasan jaringan dan program.

DAFTAR PUSTAKA

Arjul Muh, Muhtar Haboddin. 2016. Pengantar Ilmu Politik. UB Press. Malang

Arivia, Gadis. 2003. Filsafat Berperspektif Feminis. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.

Basrowi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta. Jakarta.

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Jakarta. Gramedia Pustaka Umum.

Bourdieu, Piere. 2010. Dominasi Maskulin : Jakarta:Jalasutra.

Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Dimiyati, Mochammad. 2000. Penelitian Kualitatif: Paradigma Epistemologi, Pendekatan, Metode dan Terapan. PPS Universitas Negeri. Malang.

Dahlerup, D and Freidenvall, L 2005, 'Quotas as a 'fast track' to equal representation for women', *International Feminist Journal of Politics*, vol. 7, no. 1, hal. 26 — 48.

El-Kharouf & Al-Jribia, 2017. *The Evolution of Women's Political Partisipation in Various Public Officess in Jordan*. *Journal of Social Sciences*, 13 (1): 9.22.

Fakih, Mansour. 2005. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Faulks, Keith. 2010. Sosiologi Politik. Nusamedia. Bandung.

Hiplunudin, Agus. 2017. Politik Gender. Yogyakarta : Calpulis.

Harian Tempo, 2018. Parpol Wajib Penuhi Keterwakilan 30 Persen Perempuan
<https://dpr.tempo.co/index.php/dpr/konten/5639/Parpol-Wajib-Penuhi-Keterwakilan-30-Persen-Perempuan>.

-----, 2018. Setelah Merdeka, Kaum Perempuan Justru Surut Berpolitik
<https://nasional.tempo.co/read/1068000/megawati-setelah-merdeka-kaum-perempuan-justru-surut-berpolitik>.

Idris, Nurwani, 2010. Fenomena, Feminisme dan *Political Self Selection* Bagi Perempuan ; *Phenomenon, Feminism and Political Self Selection for Women*. Jurnal Wacana Vol 13 No.1. ISSN. 1411-0199 116.

Jovani, Audra .2018. Potret Keterwakilan Politik Perempuan Anggota Legislatif di DPRD NTT pada Pemilu 2014. Jurnal Inada Vol.1 Universitas Kristen Indonesia –Jakarta

Karam, Azza 1998 *Women in Parliament : Beyond Numbers. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)*.

Manzini, Mavivi Myakayakaya. 2002. "Perempuan diberdayakan-Perempuan dalam Parlemen di Afrika Selatan" International IDEA. Stockholm.

Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta : Kencana.

Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nurchahyo, Abraham. 2016. "Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen" Jurnal Agastya Vol 6 No.1 Januari. 2016.

Outhwaite, William. 2008. Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern. Brenada Media. Jakarta.

Pitkin, Hanna Fenichel. 2004. "Representation and Democracy: Uneasy Alliance". Journal Scandinavian Political Studies, Vol. 27.

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2004. Teori Sosiologi Modern. Brenada Media. Jakarta.

Ramlan, Surbakti. 1996. Teori-Teori Politik Dewasa Ini. Rajawali Press. Jakarta.

Sadli, S. 2010. Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Jurnal Perempuan No 45.

Seamon, D. 2000. *Theoretical Perspectives in Environment-Behavior Research*. New York:Plenum.

Salviana, Vina. 2014. *Political Ideology Meaning and Public Patriachal Ideology of Female Politicians in Indonesia: A case in Malang*. Elsevier , Procedia Environmental Sciences.

Suciptaningsih, Oktaviani Adhi. 2010. Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal. Jurnal Komunitas Universitas Sunan Muria Kudus, Jawa Tengah Indonesia.
<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunita>.

Sherlock, S 2006, "Indonesia's regional representative assembly: democracy, representation and the region a report on the Dewan Perwakilan Daerah (DPD)", CDI Policy paper on Political Governance, No. 1.

Suhardono, Edy.1994. Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya. Jakarta;Gramedia Pustaka Umum.

Soekanto, Soejono. 2001. Sosiologi Sebagai Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suhrman. .2008. Partisipasi Warga dan Tata Pemerintahan Daerah. Makalah yang disampaikan pada Pertemuan Kaukus 17++ pada tanggal 4-7 Desember 2008 di Jogjakarta.

Sastriyani, Siti Hariti. 2009. *Gender and Politics*.Tiara Wacana.Yogyakarta.

Sukidin, Basrowi. 2002. Metode Penelitian Perspektif Mikro. Insan Cendekia. Surabaya.

Tuasun, Ghea Clarisa. 2015. "Kandidasi Perempuan Caleg Di Kota Surabaya Dalam Pemilihan Legislatif 2014". Jurnal Politik Muda. Vol 4, No 1.

Tremblay, M. 2007. *Democracy, Representation and Women: A Comparative Analysis, Democratization*, 14 (4), pp. 533-553.

Tong, Rosemarie Putnam. 1998. Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis, Penerjemah, Aquarini Priyatna Prabasmoro, Yogyakarta: Jalasutra.

Umar, Nasaruddin. 2010. Fikih Wanita untuk Semua : Jakarta: Serambi.

Wijaksana, MB. 2004. Modul Perempuan untuk Politik. Jurnal Prisma. No. 7.

Wolfman, Brunetta. 1992. Peran Kaum Wanita. Yogyakarta. Kanisius





LAMPIRAN

